



IMAM TOHARI
KASAT POL PP BATAM

AMSAKAR ACHMAD
WALI KOTA BATAM

LI CLAUDIA CHANDRA
WAKIL WALI KOTA BATAM

GITA MALINDA
SEKRETARIS POL PP BATAM



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

LKJIP 2025

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatNya-lah kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan dan Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kinerja, laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran, dan penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu evaluasi sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk perbaikan kinerja ke depannya.



Batam, Februari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam

Imam Tohari. S.H.M.H
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19730510 200701 1 033

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam Tahun 2025. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam, pada tahun 2025 memiliki 2 sasaran strategis dengan total 3 indikator kinerja, dan 3 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 3 target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	87	91.18	104.80
Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (indeks)	80.67%	85.93%	106.52
	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM) (indeks)	22.89%	22.02%	96.20%

Kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 63.777.675.606, atau 90.85% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 70.204.223.129.

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	viii

Contents

BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Gambaran Umum	3
I.2.1 Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	3
I.3 Isu-isu Strategis	13
I.3.1 Tingkat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	14
I.4 Sistematika Penulisan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
II.1 Penjenjangan Strategis	19
II.2 Indikator Kinerja Utama	40
II.3 Perjanjian Kinerja	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
III.1 Pengukuran Kinerja	46
III.2 Analisis Kinerja	47
III.3 Prestasi Kinerja lainnya	49
III.4 Akuntabilitas Anggaran	50
III.5 Akuntabilitas Keuangan	103
BAB IV PENUTUP	108

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	4
Tabel I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Tabel I.3 Daftar Jabatan	6
Tabel I.4 Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	7
Tabel I.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	9
Tabel I.6 Permasalahan Isu Strategis	13
Tabel I.7 Permasalahan dan Hambatan.....	17
Tabel II.1 Matriks Penjenjangan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.....	23
Tabel II.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.....	32
Tabel II.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.....	33
Tabel II.4 Capaian Indikator Kinerja Utama 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	40
Tabel II.5 Perbandingan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.....	41
Tabel II.6 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	41
Tabel II.7 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten Kota.....	42
Tabel II.8 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.....	44
Tabel II.9 Anggaran Per Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	45
Tabel II.10 Anggaran dan Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	45
Tabel III.1 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	46
Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.....	48
Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Pemerintah Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.....	49
Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan SPM	50

Tabel III.5 Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025	51
Tabel III.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	51
Tabel III.7 Pencapaian Target Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025.....	52
Tabel III.8 Analisis Pencapaian Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025	54
Tabel III.9 Penyebab Ketenteraman Ketertiban Umum	56
Tabel III.10 Sebaran Patroli Pengawasan Per Kecamatan Triwulan I s.d IV Tahun 2025.....	56
Tabel III.11 Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2024-2025.....	58
Tabel III.12 Pencapaian Indikator Satuan Polisi Pamong Praja Dibandingkan Target Akhir Renstra Kota Batam	58
Tabel III.13 Analis Pencapaian Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025	65
Tabel III.14 Penyebab Ketenteraman Ketertiban Umum Tahun 2025.....	66
Tabel III.15 Sebaran Penyebab Ketenteraman Ketertiban Umum Tahun 2025	67
Tabel III.16 Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024-2025	69
Tabel III.17 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Dibanding Target Akhir Renstra Tahun 2025	71
Tabel III.18 Indikator dan Realisasi Kinerja Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Tahun 2025.....	72
Tabel III.19 Indikator dan Realisasi Kinerja Kegiatan Sasaran Program Indikator Kinerja Tahun 2025.....	74
Tabel III.20 Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Indikator Sub Kegiatan Tahun 2025	77
Tabel III.21 Analisis Pencapaian Sasaran 1 : Indikator Kinerja Tahun 2025	79
Tabel III.22 Perbandingan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	80
Tabel III.23 Pencapaian Indikator Kinerja Dibandingkan Target Akhir Renstra Kota BatamTahun 2025	84
Tabel III.24 Indikator dan Realisasi Kinerja Program Sasaran Program Satpol PP Kota Batam Tahun 2025	83

Tabel III.25 Indikator Kinerja Kegiatan dan Realisasi Sasaran Kegiatan Satpol PP Kota Batam Tahun 2025	84
Tabel III.26 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Indeks Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kategori Baik Tahun 2025	91
Tabel III.27 Analisis Pencapaian Sasaran Indikator Indeks Pelayanan Publik Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kategori Baik Tahun 2025	92
Tabel III.28 Perbandingan IKM dan Indeks Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kategori Baik Tahun 2025	93
Tabel III.29 Analisis Data Laporan IKM Berdasarkan Data Tiap Unsur Pelayanan Tahun 2025.....	94
Tabel III.30 Pengelolaan Data Pengaduan Masyarakat Tahun 2025.....	95
Tabel III.31 Gambaran Realisasi IKM SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kota Batam Tahun 2025.....	100
Tabel III.32 Indikator dan Realisasi Kinerja Program Sasaran Program Tahun 2025	102
Tabel III.33 Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025	104
Tabel III.34 Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pecapaian Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025.....	105
Tabel IV.1 Capaian kinerja Indikator Sasaran Strategi Tahun 2025	114

Daftar Gambar

Gambar I.1 Struktur Organissai Satpol PP	12
Gambar III.1 Peta Sebaran Pelanggaran Ketenteraman Ketertiban Umum di Kota Batam Tahun 2025.....	57
Gambar III.2 Perbandingan Indikator Kinerja Kota Batam dengan Kabupaten /Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	59
Gambar III.3 Peta Sebaran Kegiatan Satpol PP Di Kota Batam Tahun 2025...	68
Gambar III.4 Gambaran Perbandingan indikator Kinerja Sasaran Periode Tahun 2021-2025	69
Gambar III.5 Perbandingan Indikator Kinerja [IPKKU] Kota Batam dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	74
Gambar III.6 Jumlah indikator Periode Tahun 2021-2024.....	81
Gambar III.7 Peta Sebaran Pencapaian Indikator Kinerja Dibandingkan Target Akhir Renstra Di Kota BatamTahun 2025.....	82
Gambar III.8 Perbandingan IKM dan Indeks Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kategori Sangat Baik Tahun 2024 - 2025	94
Gambar III.9 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 dan 2025.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil. Setiap instansi pemerintah dituntut untuk mampu menunjukkan kinerja yang dicapai sebagai wujud penggunaan sumber daya negara secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebagai landasan hukum, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menegaskan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, ketentuan teknis mengenai penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai sistematika, substansi, serta mekanisme penyusunan Laporan Kinerja agar laporan yang dihasilkan dapat menggambarkan tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja secara objektif dan terukur.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam evaluasi kinerja, peningkatan kualitas perencanaan, serta pengambilan keputusan manajerial. Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan serta mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja adalah dokumen yang disusun oleh instansi pemerintah sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk menyajikan dan melaporkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja dalam satu periode tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Proses pembuatan Laporan Kinerja meliputi penetapan perjanjian kinerja, pengumpulan dan pengukuran data realisasi kinerja, analisis capaian kinerja, penyusunan laporan sesuai ketentuan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014, review internal oleh APIP, serta penyampaian laporan sebagai bentuk akuntabilitas instansi pemerintah.

Laporan Kinerja memiliki hubungan yang erat dengan dokumen perencanaan karena disusun sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Sasaran, indikator, dan target kinerja dalam Laporan Kinerja bersumber dari dokumen perencanaan seperti RPJMN/RPJMD, Renstra, dan Renja. Dengan demikian, Laporan Kinerja berfungsi untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran perencanaan serta menjadi umpan balik dalam penyempurnaan perencanaan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja berperan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan selanjutnya dengan memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran,

efektivitas program dan kegiatan, serta permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi dalam Laporan Kinerja digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan berikutnya, penetapan target yang lebih realistis, serta pengambilan keputusan agar perencanaan dan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah menjadi lebih efektif dan berorientasi pada hasil

I.2 Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam merupakan perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Satpol PP berperan dalam mendukung terciptanya lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso No 01 Sagulung Kota Batam.

I.2.1 Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terdiri dari aparatur sipil negara yang belum semua memiliki kompetensi di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Aparatur Satpol PP didukung oleh struktur organisasi, pembagian tugas yang jelas, serta peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif. Ketersediaan dan kualitas sumber daya aparatur menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian kinerja Satpol PP sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Untuk Tahun 2025 Sarana dan Prasarana Satpol PP Kota Batam Belum mencukupi atau masih kurang, karna keterbatasan anggaran dan Usia Kendaraan yang sudah tidak layak pakai. Satpol PP Kota Batam saat ini memiliki 588 (lima ratus delapan puluh delapan) orang aparatur yang terdiri dari 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang PNS 415 (empat ratus lima belas) orang P3K.

Tabel I.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja/Bidang		Pendidikan							
			S2	S1	DIII	DII	SMA	SMP	SD	Jumlah
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1		Kepala Satuan	1							1
2		Sekretariat	2	11	2	0	3	0	0	18
	a.	Sekretaris	1							
	b.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1							
	c	Kasubbag. Perencanaan Program		1						
	d	Kasubbag. Keuangan		1						
	e	Jabatan Fungsional			1		3			
	f	Fungsional Umum/Pelaksana		5						
	g	PPPK		4						
3		Bidang Trantibum	3	32	4	1	429	0	4	473
	a.	Kabid. Trantibum	1							
	b.	Kasi. Operasi dan Pengendalian	1							
	c	Kasi. Pendataan dan Penataan		1						
	d	Kelompok Jabatan Fungsional	1							
	e	Jabatan Fungsional		20	1	1	31			
	f	Fungsional Umum/Pelaksana		7			18		1	
	g	PPPK		4	3		380		3	
4		Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	1	20	2	0	40	1	2	66
	a.	Kabid. PPUD	1							
	b.	Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan		1						
	c	Kasi. Pembinaan dan Pengawasan		1						
	d	Kelompok Jabatan Fungsional		0						
	e	Jabatan Fungsional		1						
	f	Fungsional Umum/Pelaksana		11	1		40	1	2	
	g	PPPK		6	1					
5		Bidang Sumber Daya Aparatur	0	11	1	0	6	0	0	18
	a.	Kabid. SDA		0						
	b.	Kasi. Teknis Fungsional		1						
	c	Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS		0						
	d	Kelompok Jabatan Fungsional		1						
	e	Jabatan Fungsional								
	f	Fungsional Umum/Pelaksana		2			6			
	g	PPPK		7	1					
6		Bidang Perlindungan Masyarakat	0	9	2	0	1	0	0	12
	a.	Kabid. Linmas								

No	Unit Kerja/Bidang		Pendidikan							
			S2	S1	DIII	DII	SMA	SMP	SD	Jumlah
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	b.	Kasi. Potensi dan Sumber Daya Linmas		1						
	c	Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas		1						
	d	Kelompok Jabatan Fungsional		1						
	e	Jabatan Fungsional		1						
	f	Fungsional Umum/Pelaksana		2			1			
	g	PPPK		3	2					
		Jumlah	7	83	11	1	479	1	6	588

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Desember 2025

Tabel I.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja/Bidang		Jenis Kelamin		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2		3	4	5
1		Kepala Satuan	1	0	
2		Sekretariat	9	9	18
	a.	Sekretaris		1	
	b.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1		
	c	Kasubbag. Peremncanaan Program		1	
	d	Kasubbag. Keuangan	1		
	e	Jabatan Fungsional			
	f	Fungsional Umum/Pelaksana	6	3	
	g	PPPK	1	4	
3		Bidang Trantibum	438	35	473
	a.	Kabid. Trantibum	1		
	b.	Kasi. Operasi dan Pengendalian	1		
	c	Kasi. Pendataan dan Penataan		1	
	d	Kelompok Jabatan Fungsional	1		
	e	Jabatan Fungsional	51	1	
	f	Fungsional Umum/Pelaksana	27		
	g	PPPK	357	33	
4		Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	63	3	66
	a.	Kabid. PPUD	1		
	b.	Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan	1		
	c	Kasi. Pembinaan dan Pengawasan	1		
	d	Kelompok Jabatan Fungsional	0		
	e	Jabatan Fungsional	1		

No	Unit Kerja/Bidang		Jenis Kelamin		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2		3	4	5
	f	Fungsional Umum/Pelaksana	55		
	g	PPPK	4	3	
5		Bidang Sumber Daya Aparatur	17	1	18
	a.	Kabid. SDA	0		
	b.	Kasi. Teknis Fungsional	1		
	c	Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS	0		
	d	Kelompok Jabatan Fungsional	1		
	e	Jabatan Fungsional			
	f	Fungsional Umum/Pelaksana	8		
	g	PPPK	7	1	
6		Bidang Perlindungan Masyarakat	10	2	12
	a.	Kabid. Linmas	1		
	b.	Kasi. Potensi dan Sumber Daya Linmas	1		
	c	Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas	1		
	d	Kelompok Jabatan Fungsional	1		
	e	Jabatan Fungsional			
	f	Fungsional Umum/Pelaksana	3		
	g	PPPK	3	2	
		Jumlah	538	48	588

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Desember 2025

Tabel I.3
Daftar Jabatan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Kepala Satuan	1	Struktural
2	Sekretaris	1	Struktural
3	Kabid. Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Struktural
4	Kabid. Penegakan Perundang-undangan Daerah	1	Struktural
5	Kabid. Bidang Sumber Daya Aparatur	0	Struktural
6	Kabid. Bidang Perlindungan Masyarakat	1	Struktural
7	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1	Struktural
8	Kasubbag. Perencanaan Program	1	Struktural
9	Kasubbag. Keuangan	1	Struktural
10	Kasi. Operasional dan Pengendalian	1	Struktural
11	Kasi. Pendataan dan Penataan	1	Struktural
12	Kelompok Jabatan Fungsional	1	Fungsional

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
13	Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan	1	Struktural
14	Kasi. Pembinaan dan Pengawasan	1	Struktural
15	Kelompok Jabatan Fungsional	0	Fungsional
16	Kasi. Teknis Fungsional	1	Struktural
17	Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS	0	Struktural
18	Kelompok Jabatan Fungsional	1	Fungsional
19	Kasi. Potensi dan Sumber Daya Linmas	1	Struktural
20	Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas	1	Struktural
21	Kelompok Jabatan Fungsional	1	Fungsional
22	Jabatan Fungsional Tertentu	74	Fungsional
23	Fungsional Umum/Pelaksana	496	Fungsional
	Total	588	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Desember 2025

Tabel I.4
Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Bidang/ 15.144 M ²	1			
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 Unit	6		2	
3	Gedung Pos Jaga Permanen	4 Unit /12 M ²	1			3
4	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	14 Unit			12	2
5	Sepeda Motor	8 Unit	3			5
6	Mini Bus	3 Unit	2			
7	Bus	1 Unit	1			1
8	Pick Up	3 Unit	1	1	1	
9	Truk Angkutan Personil	5 Unit	1	2		
10	Truk Angkutan Barang	2 Unit	1			
11	Filing Cabinet Besi	20 Unit	10	10		
12	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1 Unit	1			
13	Alat Penghancur Kertas	3 Unit	3			
14	Papan Nama Instansi	1 Unit	1			

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
15	Sofa	1 Unit	1			
16	Rak Besi	1 Unit		1		
17	Sound System	1 Unit	1			
18	Unit Power Supply	1 Unit	1			
19	PC Unit	30 Unit	16	13		1
20	Printer	24 Unit	22	2		
21	Laptop	7 Unit	5			2
22	Scanner	4 Unit	2		1	1
23	LCD Proyektor	1 Unit	1			
24	Layar Proyektor	1 Buah	1			
25	Camera Digital	1 Unit	1			
26	Handy Talky (HT)	10 Buah	0		5	5
27	Pistol (Senjata Api)	5 Buah	5			
28	Pakaian PHH (Lengkap dengan Tameng dan Tongkat)	38 Unit/Set	38			
29	LCD Monitor	2 Unit	1			1
30	Loadspeaker	1 Unit	1			
31	Megaphone	4 Buah	4			
32	CCTV	16 Unit	14			2
33	Mesin Pemotong Rumput	6 Unit	2			4
34	AC	28 Unit	13		5	10
35	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	11			
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6 Unit	2		4	
37	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	17 Unit	3		4	10
38	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	40 Unit	25		15	
39	Kursi Kerja Eselon II	1 Unit	1			
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6 Unit	2		1	3
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16 Unit	6			10
42	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	12 Unit	1			11
43	Faksimili	1 Unit	1			
44	Vertical Blind	1 Unit	1			
45	Wireles	1 Unit	1			
46	Tangki Air	1 Unit	1			
47	Loudspeaker	1 Unit	1			
48	White Board	2	2			
49	Teralis	80 M2	80 M2			
50	Drone	1 Unit	1			

Sumber : Pengurus Barang Desember 2025

Tabel I.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

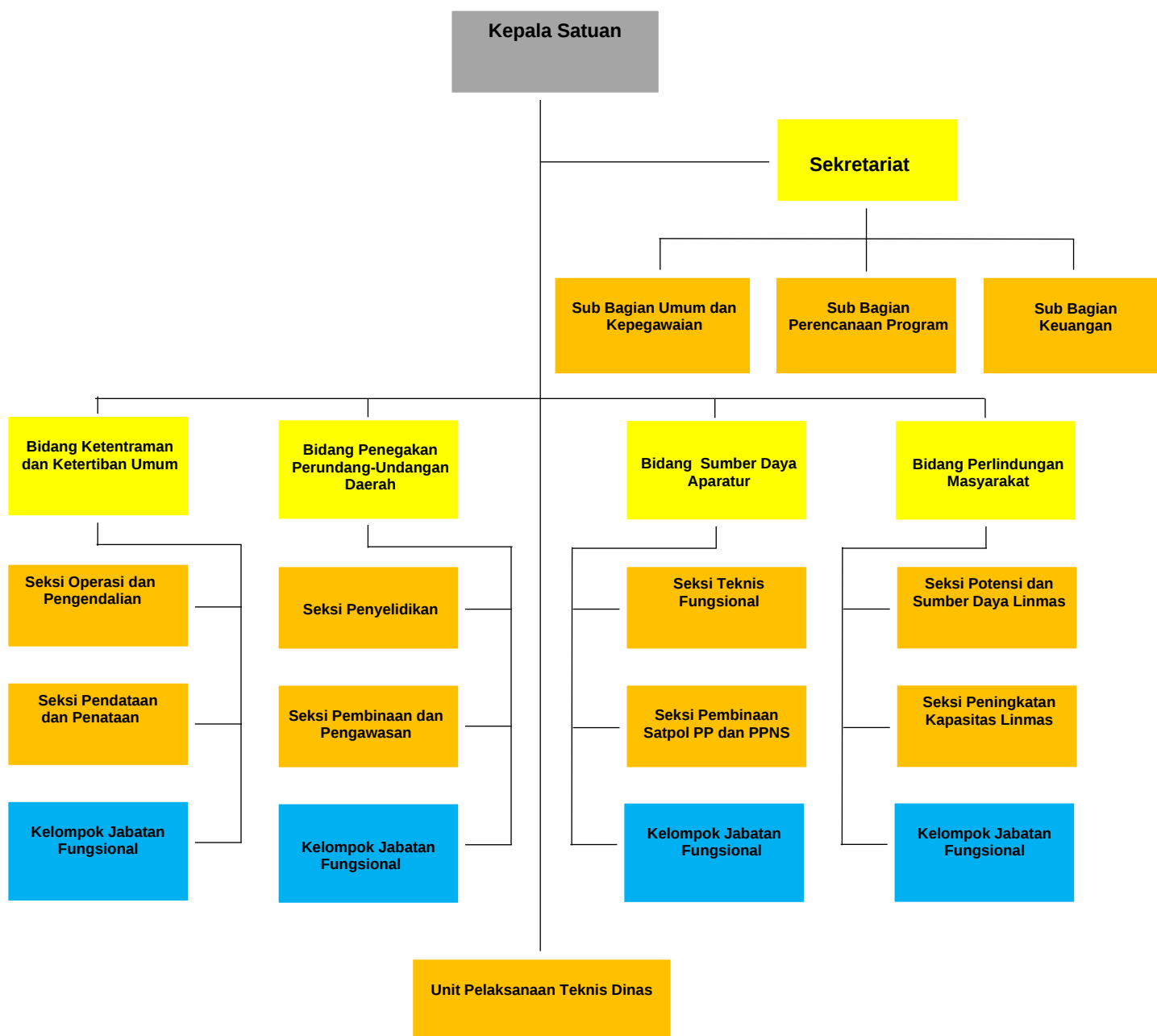
No	Unit Kerja/Bidang /Jabatan	Pangkat/Golongan/Ruang															Jumlah
		Pembina Tk I/(IV/b)	Pembina (IV/a)	Penata Tk.I (III/d)	Penata (III/c)	Penata Muda (Tk.II/b)	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk.II (II/d)	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengatur Muda (II/a)	Juru Tk I/(II/d)	Juru / (II/c)	Juru Muda Tk I (II/b)	Juru Muda (II/a)	PPPK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kepala Satuan	1															1
2	Sekretariat	0	2	2	3	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0		18
a	Sekretaris		1														
b	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian		1														
c	Kasubbag. Perencanaan Program				1												
d	Kasubbag. Keuangan			11													
e	Jabatan Fungsional																
f	Fungsional Umum/Pelaksana			1	2	4	1	1									
g	PPPK					4	1										
3	Bidang Trantibum		2	3	10	16	24	25	7	2	380	1	0	0	3		473
a	Kabid. Trantibum		1														
b	Kasi. Operasi dan Pengendalian			1													
c	Kasi. Pendataan dan Penataan			1													
d	Kelompok Jabatan Fungsional	1															
e	Jabatan Fungsional			6	13	9	19	3	2		0	0					
f	Fungsional Umum/Pelaksana		1	4	3	11	3	4	0	0	1	0					
g	PPPK						4	3			380				3		390

No		Unit Kerja/Bidang /Jabatan	Pangkat/Golongan/Ruang															
			Pembina Tk II/(IV/b)	Pembina (IV/a)	Penata Tk.I (III/d)	Penata (III/c)	Penata Muda (Tk.II/b)	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk.II (II/d)	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengatur Muda (II/a)	Juru Tk II/(I/d)	Juru / (I/c)	Juru Muda Tk I (I/b)	Juru Muda (I/a)	PPPK	Jumlah
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4		Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	0	4	9	0	37	9	3	2	0	0	2	0	0	0	0	66
	a .	Kabid. PPUD		1														
	b .	Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan		1														
	c	Kasi. Pembinaan dan Pengawasan		1														
	d	Kelompok Jabatan Fungsional																
	e	Jabatan Fungsional			1													
	f	Fungsional Umum/Pelaksana		1	8	0	31	8	3	2			2					
	g	PPPK					6	1										
5		Bidang Sumber Daya Aparatur		2	0	2	12	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	18
	a .	Kabid. SDA																
	b .	Kasi. Teknis Fungsional		1														
	c	Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS																
	d	Kelompok Jabatan Fungsional		1														
	e	Jabatan Fungsional																
	f	Fungsional Umum/Pelaksana				2	5				1							
	g	PPPK					7	1										
6		Bidang Perlindungan Masyarakat			4	2	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	12

No		Unit Kerja/Bidang /Jabatan	Pangkat/Golongan/Ruang															
			Pembina Tk I/(IV/b)	Pembina (IV/a)	Penata Tk.I (III/d)	Penata (III/c)	Penata Muda (Tk.II/b)	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk.II/(II/d)	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengatur Muda (II/a)	Juru Tk I/(II/d)	Juru / (II/c)	Juru Muda Tk I (II/b)	Juru Muda (II/a)	PPPK	Jumlah
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	a	Kabid. Linmas			1													
	b	Kasi. Potensi dan Sumber Daya Linmas			1													
	c	Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas			1													
	d	Kelompok Jabatan Fungsional			1													
	e	Jabatan Fungsional																
	f	Fungsional Umum/Pelaksana				2				1								
	g	PPPK						3	2									
		Jumlah	1	2	15	24	22	81	39	11	4	381	1	2	0	3	0	588

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Desember 2025

Struktur Organisasi Satpol PP Kota Batam dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

I.3 Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah masalah atau tantangan utama yang sangat penting dan berdampak besar terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi, daerah, baik dalam jangka menengah maupun panjang. Permasalahan dan Isu Strategis RKPD Kota Batam Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel I.6
Permasalahan Isu Strategis

PERMASALAHAN DAERAH	ISU STRATEGIS
1	2
Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing	Peluang investasi global dalam upaya percepatan transformasi inklusi ekonomi berkelanjutan
Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Pengembangan Wilayah untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah dan menjamin pemerataan pembangunan (ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dasar, dan Kebutuhan dasar lainnya) berbasis penyalarsan pemanfaatan ruang Keterbatasan akses telekomunikasi karena masih adanya ketimpangan infrastruktur dan regulasi
Belum Optimalnya Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Masyarakat yang Merata dan Berkualitas	Pemerataan Kesejahteraan, Pengentasan Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial Masyarakat
Belum Optimalnya Kualitas SDM Kota Batam	Optimalisasi Bonus Demografi melalui Peningkatan Kualitas SDM sebagai Penguatan Fondasi Pembangunan
Belum Optimalnya penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Reformasi birokrasi mewujudkan Good Governance
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Pengelolaan Sampah tanpa ada pengelolaan lanjutan
Belum Optimalnya Upaya Pelestarian Nilai Kebudayaan, Norma, dan Pembangunan Berbasis Gender	Bencana akibat human error dan aktivitas pembangunan Belum Optimalnya Upaya Pelestarian Nilai Kebudayaan, Norma, dan Pembangunan Berbasis Gender Meningkatkan dampak negatif arus

PERMASALAHAN DAERAH	ISU STRATEGIS
1	2
	informasi di era digital pada karakter dan norma di masyarakat

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Isu Strategis Perubahan RKPD Kota Batam secara keseluruhan masuk ke dalam permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, karena semuanya berkaitan dengan Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

I.3.1 Tingkat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Isu isu penting dalam pelayanan Satuan Polisi Pmaong Praja Kota Batam adalah :

1. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Efektivitas penegakan seringkali menjadi sorotan, tantangannya meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, resistensi terhadap penertiban, potensi konflik sosial, dan keterbatasan sumber daya Satpol PP. Pentingnya Penegakan Perda dan Perkada adalah fungsi utama Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan kewibawaan pemerintah daerah.

2. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Menjaga ketertiban di ruang public dan melaksanakan deteksi dini, mengatasi pedagang kaki lima (PKL) ilegal, gelandangan dan pengemis (PMKS), Wanita Tuna susila (WTS) serta gangguan ketertiban lainnya seringkali menimbulkan gesekan dan memerlukan pendekatan yang humanis namun tegas. Kondisi tertib dan tenteram adalah prasyarat bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang kondusif.

3. Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)

Peran Satpol PP dalam membantu penanganan bencana, evakuasi, dan pengamanan kegiatan masyarakat seringkali kurang optimal atau kurang

terkoordinasi dengan instansi lain. Satpol PP memiliki potensi besar sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dalam berbagai situasi, namun untuk di Kota Batam saat ini belum adanya Satlinmas yang membantu dilingkungan Masyarakat terkait anggaran dalam pengukuhan Satlinmas di Kota Batam.

4. Pelayanan yang Humanis dan Profesional

Citra Satpol PP terkadang dinilai kurang humanis atau bahkan represif di lapangan, peningkatan profesionalisme, pemahaman hak asasi manusia, dan kemampuan komunikasi yang baik menjadi krusial. Maka dengan itu Pelayanan yang humanis dan profesional akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap Satpol PP.

5. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi Lain

Kurangnya koordinasi dengan kepolisian, dinas sosial, Dinas Vertikal dan instansi terkait lainnya dapat menghambat efektivitas penegakan dan pelayanan. Sinergi yang baik akan memperkuat pelaksanaan tugas dan menghindari tumpang tindih kewenangan.

6. Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kurangnya pelatihan yang memadai, dan rendahnya kesejahteraan anggota dapat mempengaruhi kinerja Satpol PP. Personel yang kompeten, profesional, dan memiliki motivasi tinggi adalah kunci keberhasilan pelaksanaan tugas.

7. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan atau kondisi sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional yang sudah tidak layak pakai, peralatan penertiban, dan fasilitas pendukung lainnya dapat menghambat mobilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang kelancaran operasional Satpol PP.

8. Transparansi dan Akuntabilitas

Potensi penyalahgunaan wewenang dan kurangnya transparansi dalam tindakan penertiban dapat menurunkan kepercayaan publik, serta banyak

oknum oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, serta transparansi dan akuntabilitas akan memastikan tindakan Satpol PP dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor yang Terkait dengan Isu Pelayanan Satpol PP adalah :

1) Regulasi dan Kebijakan

Kejelasan dan konsistensi Perda dan Perkada, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan Kepala Daerah sangat mempengaruhi efektivitas Satpol PP.

2) Anggaran Ketersediaan anggaran yang memadai untuk operasional, pelatihan, dan pengadaan sarana prasarana menjadi faktor krusial.

3) Kepemimpinan Visi dan komitmen pimpinan Satpol PP serta dukungan dari kepala daerah sangat menentukan arah dan kualitas pelayanan.

4) Kultur Organisasi

Budaya kerja, disiplin, dan etos kerja anggota Satpol PP mempengaruhi kinerja secara keseluruhan.

5) Partisipasi Masyarakat

Dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan Perda Perkada sangat membantu tugas Satpol PP.

6) Pengawasan

Pengawasan internal dan eksternal yang efektif dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas Satpol PP dalam menjalankan Tupoksinya.

7) Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pemantauan, pelaporan, dan koordinasi saat turun lapangan dengan instansi terkait atau pun Masyarakat.

8) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial dapat mempengaruhi tingkat pelanggaran Ketenteraman ketertiban umum serta Pelanggaran Perda dan Perkada di kota Batam.

Tabel I.7
Permasalahan dan Hambatan

No	Permasalahan	Akar Masalah
1	2	3
1.	Belum Optimalnya Perwujudan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga Trantibum, Perda dan Perkada 2. Kurangnya sosialisasi perda dan perkada kepada masyarakat
2.	Gangguan Ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat cukup tinggi	Belum optimalnya personil Satlinmas yang terlibat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Batam
3	Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	Alokasi anggaran pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasana terbatas
4	Masih tingginya pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan pelanggaran terhadap perda perkada	1. Upaya penegakan peraturan daerah masih belum optimal 2. Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran trantibum dan perda perkada

Sumber : Hasil Analisis

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 terdiri dari 4 bab meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya LKJIP profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis

Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi dan Misi Kota Batam periode 2025-2029 merupakan visi dan misi sekaligus janji politik dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024. Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih telah dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode 2025-2029 pada tanggal 27 November 2024. Kepala Daerah atau Wali Kota Batam periode 2025-2029 adalah H. Amsakar Achmad, sementara Wakil Wali Kota Batam periode 2025 – 2029 adalah Li Claudia Candra. Sejak pelantikan tersebut, maka visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Visi dan Misi Kota Batam periode 2025–2029. Visi Kota Batam periode 2025-2029 adalah **“BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA”**. Visi tersebut mengandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak

diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Makna terinci dari ke empat pokok visi di atas adalah sebagai berikut:

a. "Madani dan Berbudaya"

Madani dan berbudaya menggambarkan kondisi masyarakat Kota Batam yang beradab dan berperilaku baik. Tata nilai atau norma budaya merupakan modal utama dalam upaya mewujudkan masyarakat madani. Hal tersebut menjadi dasar dikarenakan budaya merupakan cara pola kehidupan yang meliputi pengetahuan, sikap, pola perilaku, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh masyarakat tertentu sebagai bukti keberlangsungan suatu peradaban manusia untuk mengatasi berbagai persoalan, rintangan dan kesukaran hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai. Perwujudan masyarakat madani dan berbudaya Kota Batam digambarkan masyarakat Kota Batam yang memiliki kemandirian dalam menjalankan kegiatan sosial, ekonomi, dan politiknya. Masyarakat juga menjunjung tinggi norma-norma yang baik dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Hal ini termasuk kemampuan masyarakat dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, mengatur dirinya sendiri, serta memperjuangkan hak dan kepentingannya.

b. "Inovatif"

Inovatif dalam hal ini digambarkan dengan pemerintahan yang menerapkan ide-ide baru dan kreatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi ini dapat dilakukan di semua bidang, seperti peningkatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan serta segala hal yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (PD) wajib berinovasi dan mengembangkan kreativitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kreativitas dan inovasi yang ada diharapkan dapat diimplementasikan kepada masyarakat dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. “Berkelanjutan”

Kota Batam mengalami pertumbuhan yang pesat dan merupakan salah satu dari penyumbang terbesar perekonomian Provinsi dan Nasional, sehingga perlu menerapkan konsep berkelanjutan dalam setiap aspek pembangunan karena di sisi lain, terjadi eksternalitas negatif dari pembangunan ekonomi yang berpotensi menghalangi terciptanya suatu inclusive green economy. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

d. “Pusat Investasi dan Pariwisata”

Perwujudan Kota Batam sebagai pusat investasi adalah investasi yang masuk Kota Batam diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, dengan begitu hal ini dapat mengatasi angka pengangguran. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membuka peluang investasi secara positif bagi upaya perbaikan atas kelemahan/kekurangan pembangunan di daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di daerah maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu dan peningkatan kemudahan investasi sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Kota Batam. Kota Batam merupakan wilayah dengan beragam destinasi wisata baik bernuansa alam maupun budaya yang banyak diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, kepariwisataan menjadi salah satu perhatian utama bagi Pemerintah Kota Batam. Menjadi Kota dengan pariwisata terdepan diwujudkan dengan mengembangkan destinasi dan produk pariwisata berbasis alam, budaya dan

belanja dengan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi serta meningkatkan promosi pariwisata Batam di dalam dan di luar negeri secara bersinergi dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru. Pariwisata yang maju dilakukan melalui upaya peningkatan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.

Untuk mencapai visi “Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata”, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2025-2029 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) MISI 1 Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global
- 2) MISI 2 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
- 3) MISI 3 Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia
- 4) MISI 4 Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang good governance
- 5) MISI 5 Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut tabel penjenjangan strategisnya :

Tabel II.1
Matriks Penjenjangan Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	51.78
	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan				Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	87
	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman				Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	80.67
	Ketertiban Umum, dan Perda Perkada				Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	22.89
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.55
					Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:NILAI)	87
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi	100

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
					keuangan (Dengan Satuan:Persentase)	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	601
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	33
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)	86.05
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	111
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)	100
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	100
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	72
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	21
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai	100

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
					perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase)	100
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	11
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	28
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
					Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	
		Progran Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persentase penyelenggaraan trantibum yang di laksanakan oleh satpol pp (Dengan Satuan:persentase)	100
					persentase jumlah anggota satpol pp yang telah mengikuti diklat dasar (Dengan Satuan:persentase)	19.57
					Persentase perda perkara yang di tegakan (Dengan Satuan:persentase)	100
					Persentase penyelenggaraan satlinmas (Dengan Satuan:persentase)	9.09
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Strategi dalam Penyelenggaraan trantibum (Dengan Satuan:persentase)	100
					Persentase Capaian Strategi, Peningkatan efektivitas Pelayanan dan Pemberdayaan SDM dalam Penyelenggaraan Satlinmas (Dengan Satuan:persentase)	9.09
					Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas SDM	19.57

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
					Satpol PP (Dengan Satuan:persentase)	
					Persentase jenis sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan (Dengan Satuan:persentase)	100
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (Dengan Satuan:persentase)	100
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
				Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Dengan Satuan:Orang)	9
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	40
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Dengan Satuan:laporan)	12
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	12

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
					Penindakan (Dengan Satuan:Laporan)	
				Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Dengan Satuan:Laporan)	12
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	9
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Capaian Strategi dalam Penegakan Perda Perkada (Dengan Satuan:persentase)	100
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	7
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala	12

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7
					daerah Sesuai SOP (Dengan Satuan:Laporan)	
				Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	14
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Rasio PPNS Satpol PP (Dengan Satuan:persentase)	6.04
				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Dengan Satuan:Laporan)	1

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

II.1.1 Rencana Kinerja

Renja adalah dokumen perencanaan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tabel II.2
Perencanaan Kinerja Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	20230
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Keamanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	51.78	60.48	70.81	71.99	75.42	77.47
		Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	87	89	91	93	95	97
		Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	80.67	84.34	85.73	86.12	88.91	93.01
			Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	22.89	36.62	55.89	57.86	61.93	61.93

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Tabel II.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Program	/Kegiatan	/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70.55	67.190.550.029,00
				Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:NILAI)	87	
1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:Persentase)	100	55.774.402.629,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	601(ambil dr DPA P)	55.710.302.629
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	33	64.100.000
2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)	86.05	1.291.032.000
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	667.110.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	111	623.922.000

No	Program	/Kegiatan	/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)	100	233.171.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	5.710.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	58.650.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	58.760.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	32.059.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	3.600.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	74.392.000
4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	100	1.397.776.000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	682.686.000
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	72	516.655.000

No	Program	/Kegiatan	/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	21	198.435.000
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)	100	8.218.134.400
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	205.740.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	8.012.394.400
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase)	100	276.034.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	41.380.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	11	154.070.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	28	21.240.000

No	Program	/Kegiatan	/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	59.344.000
	Progran Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persentase penyelenggaraan trantibum yang di laksanakan oleh satpol pp (Dengan Satuan:persentase)	100	3.013..673.100
				persentase jumlah anggota satpol pp yang telah mengikuti diklat dasar (Dengan Satuan:persentase)	19.57	
				Persentase perda perkara yang di tegakan (Dengan Satuan:persentase)	100	
				Persentase penyelenggaraan satlimas (Dengan Satuan:persentase)	9.09	
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Strategi dalam Penyelenggaraan trantibum (Dengan Satuan:persentase)	100	1.566.496.000
				Persentase Capaian Strategi, Peningkatan efektivitas Pelayanan dan Pemberdayaan SDM dalam Penyelenggaraan Satlinmas (Dengan Satuan:persentase)	9.09	
				Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP (Dengan Satuan:persentase)	19.57	
				Persentase jenis sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan (Dengan Satuan:persentase)	100	

No	Program	/Kegiatan	/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (Dengan Satuan:persentase)	100	
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1.368.000
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.334.000
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	850.000
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	12.316.000
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Dengan Satuan:Orang)	9	32.590.000

No	Program	/Kegiatan	/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
			Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional			
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	40	15.580.000
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (Dengan Satuan:laporan)	12	59.640.000
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	864.100.000
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Dengan Satuan:Laporan)	12	50.000.000

No	Program	/Kegiatan	/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	9	524.718.000
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Capaian Strategi dalam Penegakan Perda Perkada (Dengan Satuan:persentase)	100	1.384.893.100
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	7	19.774.000
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Dengan Satuan:Laporan)	12	1.236.419.100
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	14	128.700.000
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Rasio PPNS Satpol PP (Dengan Satuan:persentase)	6.04	62.284.000
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Dengan Satuan:Laporan)	1	62.284.000

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

II.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau metrik utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel II.4
Capaian Indikator Kinerja Utama 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Indeks)	51.78	53.98	104.24	-	Satpol PP
	1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja (Poin)	87	91.18	104.80	-	Satpol PP
	2. Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada	1. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (indeks)	80.67%	85.93%	106.52%	-	Satpol PP
		2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM) (indeks)	22.89%	22.02%	96.20%	-	Satpol PP

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Tabel II.5
Perbandingan Capaian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2025			2026			2027		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Indeks)	51.78	53.98	104.24	60.48	0	0	70.81	0	0
2	1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja (Poin)	87	91.18	104.80	89	0	0	91	0	0
3	2. Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada	1. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (indeks)	80.67%	85.93%	106.52%	84.34	0	0	85.73	0	0
		2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM) (indeks)	22.89%	22.02%	96.20%	36.62	0	0	55.89	0	0

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Tabel II.6
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Indeks)	53.98	75.42	28,43

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
2	1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja (Poin)	91,18	95	4,02
	2. Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada	1. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (indeks)	85,93	88.91	3,35
		2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM) (indeks)	22,02	61.93	64,44

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Tabel II.7
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Indeks)	53.98	-	-
2	1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja (Poin)	91.18	-	-
		1. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (indeks)	85.93%	-	-

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
	2. Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada	2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM) (indeks)	22.02%		

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

II.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen kesepakatan kinerja antara pimpinan instansi dengan pimpinan unit kerja/pejabat yang memuat komitmen untuk mencapai target kinerja tertentu dalam satu tahun anggaran. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika:

- terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);
- perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja murni di lingkungan Pemerintah Kota disusun dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan dilakukan perubahan minimal 1 kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 1 bulan setelah perubahan anggaran ditetapkan. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 yang telah mengalami perubahan dan dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini, indikatornya sebagai berikut:

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II.8
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Keamanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Persentase	51.78
2	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks	87
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Persentase	80.67
		Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	Persentase	22.89

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

Tabel II.9
Anggaran Per Program
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Program	Anggaran
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	67.190.550.029
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.013.673.100

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Anggaran dan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mendukung Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II.10
Anggaran dan Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Sasaran	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan	1	6	19	67.190.550.029
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada	1	3	14	3.013.673.100

Sumber : Laporan Hasil Olahan Perencanaan Program Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai terhadap target yang telah ditetapkan menggunakan indikator kinerja. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator sasaran strategis yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran strategis. Rincian hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator tercantum pada tabel, sebagai berikut:

Tabel III.1
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan				Realisasi 2025	Capaian
				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	87	-	-	91.18	91.18	91.18	104.80
	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perda Perkada	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	80.67	-	-	80.59	85.93	85.93	106.52
		Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	22.89	-	-	22.02	22.02	22.02	96.20

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Berdasarkan tabel capaian perjanjian kinerja tersebut dapat diketahui

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 Indikator ;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator ;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 Indikator ;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

III.2 Analisis Kinerja

Pada tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam memiliki sebanyak 2 sasaran strategis, yaitu :

1. "Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan".
2. "Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada'

Sasaran tersebut memiliki 3 indikator untuk mengukur kinerjanya, yaitu

1. Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja
2. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)
3. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)

Indikator tersebut menghitung keberhasilan penyelenggaraan indikator semua bidang di bawah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, dengan formulasi perhitungannya:

Indeks Kepuasan Masyarakat =

$$IKM = (\sum (n_i \times w_i) / (N \times k)) \times 25$$

Keterangan:

n_i = Skor yang diberikan responden pada unsur ke-i (1–4)

w_i = Bobot masing-masing unsur (dalam metode standar, bobot semua unsur sama)

Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) =

$IPKKU = \frac{\sum (N_i \times B_i)}{\sum B_i}$ [IPKKU = Jumlah nilai masing masing indikator kinerja di kali bobot dari masing - masing indikator di bagi Jumlah total bobot seluruh indikator]

Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM) =

$IPM\ Satlinmas = \frac{\sum (N_i \times B_i)}{\sum B_i}$ [IPM Satlinmas = Nilai dari indikator ke-i di kali bobot dari indikator ke-i di bagi total bobot dari indikator]

Tabel III.2
Perbandingan Realisasi Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Proses Capaian
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	91.18	0	0	0	0	95	95.98
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada	1. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	85.93	0	0	0	0	88.91	96.65
		2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	22.02	0	0	0	0	61.93	35.56

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Capaian Indikator Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM) untuk tahun 2025 sebesar 22.02%, angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar Rp.15.580.000 dan realisasi sebesar Rp.14.660.000. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target dikarenakan tingkat kehadiran masyarakat lebih rendah dari yang direncanakan. Untuk mengatasi kendala tersebut kami memberikan pemahaman peran linmas di tengah tengah masyarakat.

Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja untuk tahun 2025 sebesar 104.80. Angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 87 dan terelisasi 91.18. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

1. Penyusunan perencanaan yang sistematis dan terukur;
2. Implementasi strategi secara konsisten dan terarah;
3. Penguatan koordinasi serta kerja sama tim yang efektif;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian capaian dengan rencana;
5. Kemampuan dalam mengidentifikasi serta mengatasi hambatan secara cepat dan tepat;
6. Komitmen dan dedikasi tinggi dari seluruh pihak yang terlibat;

Realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada tahun RPJMD 2021-2026, mengingat terdapat perbedaan indikator yang digunakan. Perubahan indikator tersebut menyebabkan adanya perbedaan metode pengukuran dan parameter penilaian, sehingga hasil yang dicapai pada masing-masing periode memiliki karakteristik yang berbeda.

III.3 Prestasi Kinerja lainnya

Dengan bantuan aplikasi-aplikasi yang ada di Kota Batam, akuntabilitas kinerja di Kota Batam, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, lebih sistematis, efektif, dan efisien. Dibuktikan dengan nilai hasil evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yang mendapatkan predikat BB dengan nilai sebesar 70,55 Peningkatan kinerja juga dibuktikan melalui nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yang lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 70,49

Nilai SAKIP Satpol PP Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pusat dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel III.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Pemerintah Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi	Realisasi Pusat
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di	91.18	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi	Realisasi Pusat
1	2	3	4	5	6
		Satuan Polisi Pamong Praja			
	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada	1. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	85.93	79,15	-
		2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	22.02	-	-

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Tabel III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan SPM

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target SPM	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh pelayanan akibat dari penegakan hukum perda perkara kabupaten/kota	100%	100%	100%

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

III.4 Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2025 adalah sebesar Rp. 70.204.223.129 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 63.777.675.606 atau sebesar 90.85% dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel III.5
Realisasi Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	67.190.550.029	61.233.413.018	91.13%
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.013.673.100	2.544.262.588	84.42%

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut:

Tabel III.6
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	87	91.18	104.80%	67.190.550.029	61.233.413.018	91.13%
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada	1. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	80.67	85.93	106.52%	3.013.673.100	2.544.262.588	84.42%
		2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan	22.89	22.02	96.20%			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Masyarakat (IPM)						

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Tabel III.7
Pencapaian Target Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Tahun 2025

Pencapaian Indikator Sasaran										
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Melampaui Target		Sesuai Target		Tidak mencapai Target		Belum dilakukan pengukuran	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	61.233.413.018	91.13%	-	-	-	-	-	-
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perda Perkada	1. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	2.544.262.588	84.42%	-	-	-	-	-	-
		2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)			-	-	-	-	-	-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya

ataupun dengan kinerja sektor swasta.

- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2025-2029, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut

A.1. Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
 - Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)
 - Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)

Untuk Penjelasan umum sasaran dan indikator, Instrumen/cara pengukuran Indikator, Kinerja nyata VS Rencana, Kinerja nyata VS tahun sebelumnya, Perbandingan kinerja dengan instansi lainnya, faktor pendukung dan penghambat serta solusi akan di bahas seperti uraian di bawah ini :

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk melihat resiko yang dihadapi Indeks kepuasan masyarakat di satuan polisi pamong praja adalah melalui survey kepuasan Masyarakat adapun cara perhitungannya adalah :

Indeks Kepuasan Masyarakat =

$$IKM = (\sum (n_i \times w_i) / (N \times k)) \times 25$$
 Keterangan:

n_i = Skor yang diberikan responden pada unsur ke-i (1–4)

w_i = Bobot masing-masing unsur (dalam metode standar, bobot semua unsur sama)

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) =

$IPKKU = \frac{\sum (N_i \times B_i)}{\sum B_i}$ [IPKKU = Jumlah nilai masing masing indikator kinerja di kali bobot dari masing - masing indikator di bagi Jumlah total bobot seluruh indikator]

Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM) =

$IPM = \frac{\sum (N_i \times B_i)}{\sum B_i}$ [IPM = Nilai dari indikator ke-i di kali bobot dari indikator ke-i di bagi total bobot dari indikator]

Capaian kinerja indikator indeks kepuasan masyarakat di satuan polisi pamong praja pada tahun 2025 adalah sebesar 91.18 dengan capaian kinerja nyata sebesar 104.80% diatas target yang ditetapkan yaitu 87. Capaian indikator Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (IPKKU) pada tahun 2025 sebesar 85.93 dengan capaian kinerja nyata sebesar 106.52%, dan indikator indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat (IPM) sebesar 22.02 dengan capaian 96.20%. Indikator ini merupakan indikator positif dimana jika realisasi lebih besar dari target berarti menunjukkan keberhasilan, sementara jika realisasi lebih kecil dari target berarti menunjukkan kegagalan atau ketidak tercapaian target.

Tabel III.8
Analisis Pencapaian Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks	87	91.18	104.80%
2	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	80.67	85.93	106.52%
3	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	Indeks	22.89	22.02	96.20%

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa indikator angka 91.18 pada tahun 2025

mencapai target yang ditetapkan. Adapun faktor yang mendorong tercapainya target adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan sumber daya serta sarana dan prasarana Trantibum yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam untuk menjamin optimalisasi kualitas pelayanan publik, peningkatan kinerja aparatur, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Batam secara berkelanjutan..
2. Penambahan fasilitas pelayanan sebagai penyedia layanan publik menjadi salah satu fokus perhatian Satpol PP untuk menurunkan tingkat pengaduan masyarakat, mempercepat waktu pelayanan, serta meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh layanan
3. Peningkatan kompetensi tenaga Trantibum dalam melakukan pelayanan publik juga terus dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui Diklatsar, pelatihan, bimbingan teknis, serta penguatan kapasitas aparatur guna mewujudkan pelayanan yang profesional, responsif, dan berintegritas
4. Perbaikan pencatatan dan pelaporan pelayanan serta pelaksanaan audit internal juga telah dilaksanakan secara berkala, sehingga dapat dihasilkan analisa penyebab permasalahan dan rekomendasi perbaikan layanan yang tepat sasaran serta dilaksanakan secara berkesinambungan
5. Upaya perbaikan fisik dan sosial oleh Satpol PP Kota Batam, salah satu caranya adalah dengan terus meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat, memperluas jangkauan informasi publik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.

Peningkatan upaya promotif untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai terciptanya Ketenteraman dan ketertiban umum terus dilakukan oleh Satpol PP Kota Batam melalui berbagai media informasi dan komunikasi yang dimungkinkan Adapun penyebab Ketenteraman ketertiban umum terbanyak pada tahun 2025 dapat di lihat :

Tabel III.9
Penyebab Ketenteraman Ketertiban Umum

No	Penyebab	Jumlah	%
1	2	3	4
1.	Adanya Pelanggaran Perda Perkada	1.019 Kegiatan	
2.	Meningkatnya Gangguan Ketertiban Umum	106 Kegiatan	
3.	Adanya Pengaduan dari Masyarakat	119 Kegiatan	
TOTAL		1.244 Kegiatan	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penyebab ketenteraman ketertiban umum tertinggi pada tahun 2025 adanya pelanggaran Perda Perkada 1.019 dan Meningkatnya Gangguan Ketertiban umum 106, adanya pengaduan dari masyarakat 119 total nya ada 1.244 Kegiatan yang menjadi penyebab ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Batam. Adapun sebaran jumlah tersebut per kecamatan di triwulan 1 sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III.10
Sebaran Patroli Pengawasan Per Kecamatan
Triwulan I s.d IV Tahun 2025

No	Kecamatan			Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Batu Ampar						15	
2	Batam Kota						299	
3	Lubuk Baja						130	
4	Bengkong						29	
5	Sagulung						76	
6	Nongsa						1	
7	Batu Aji						132	
8	Galang			-	-	-	-	-
9	Bulang			-	-	-	-	-
10	Sekupang						188	
11	Sungai Beduk						60	
12	Belakang Padang			-	-	-	-	-
T o t a l							930	

Sumber Data Patroli Pengawasan

Tabel III.11
Perbandingan Indikator Kinerja
Tahun 2024-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		%	2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks	-	-	-	87	91.18	104.80%
2	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	-	-	-	80.67	85.93	106.52%
3	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	Indeks	-	-	-	22.89	22.02	96.20%

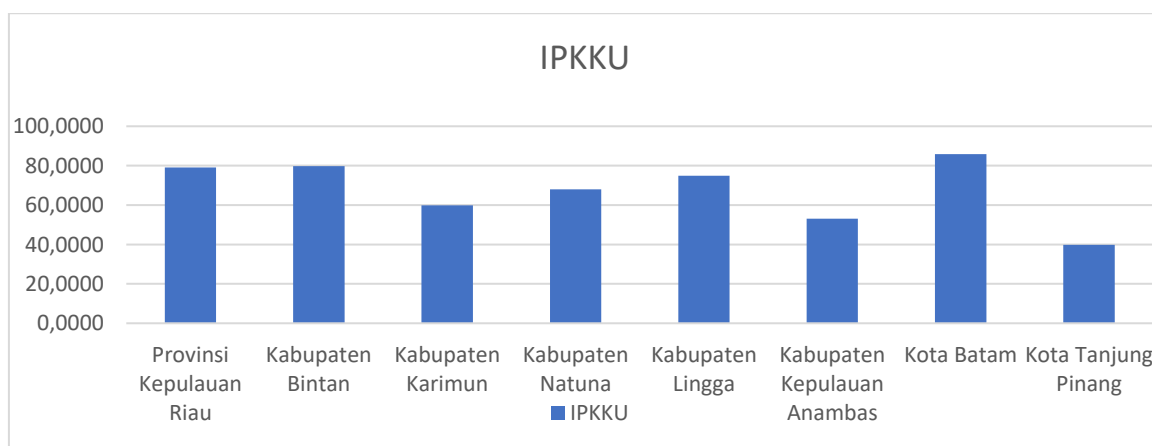
Sumber data : Laporan Hasil Olahan Perencanaan Program dan Informasi Tahun 2025

Tabel III.12
Pencapaian Indikator Satuan Polisi Pamong Praja
Dibandingkan Target Akhir Renstra Kota Batam

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2025	Rencana Sesuai Dengan Renstra Tahun 2024	Persentase Capaian Kinerja (%)	Kesenjangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks	91.18	-	-	-
2	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	85.93	-	-	-
3	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	Indeks	22.02	-	-	-

Apabila dilihat dari tabel diatas terdapat perbedaan indikator kinerja pada Tahun 2025 dibandingkan dengan indikator dalam Renstra 2021–2024. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian terhadap dokumen perencanaan strategis periode berikutnya, perubahan kebijakan daerah, serta penyempurnaan indikator guna meningkatkan kualitas pengukuran dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau maka Kota Batam menempati urutan ke 1 dari 8 Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar Grafik III.2
Perbandingan Indikator Kinerja Kota Batam dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Sumber data Provinsi Kepulauan Riau

Adapun dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja (Poin), dan sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (indeks) dan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM) (indeks) adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah





2. Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa





3. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan



4. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat



5. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum



6. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional





Tabel III.13
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2025		%
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	87	91.18	104.80%
2	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	80.67	85.93	106.52%
3	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	22.89	22.02	96.20%

Pencapaian Sasaran Strategis Satpol PP Kota Batam pada tahun 2025 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) Target 87 terealisasi 91.18, Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM) Target 22.89% terealisasi 22.02%. Adapun faktor pendorong tercapainya indikator kinerja tersebut adalah :

- a. Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan melalui Aplikasi E-SPM dan SIP Pol PP yang menjadi salah satu faktor terlaporkannya seluruh kegiatan yang sebelumnya tidak dilaporkan.
- b. Perbaikan jejaring komunikasi dengan para penanggungjawab layanan Pelanggaran Perda Perkada juga menyebabkan kualitas pelaporan semakin meningkat.
- c. Pengkajian Pelanggaran Perda Perkada dan Trantibum yang diselenggarakan secara rutin telah menghasilkan analisa penyebab serta rekomendasi untuk

mencegah terjadinya Pelanggaran Perda Perkada berikutnya.

- d. Upaya Pemerintah Kota Batam dengan membentuk Tim Audit Internal Keputusan Wali Kota Batam menjadi salah satu jalan untuk menyediakan dasar pelibatan seluruh lintas sektor terkait dalam menjalankan rekomendasi tersebut.
- e. Peningkatan upaya promotif dan preventif oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah, ketertiban umum, serta pentingnya kepatuhan terhadap norma dan kebijakan pemerintah daerah.
- f. Melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan secara humanis, Satpol PP dapat mencegah terjadinya pelanggaran, mengurangi potensi konflik, serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di masyarakat.
- g. Upaya peningkatan kualitas layanan Pengaduan Perda Perkada dan Trantibum telah dilakukan melalui penambahan sarana dan prasarana yang mampu menangani Pelanggaran Perda dan Perkada
- h. Pelaksanaan kegiatan orientasi ataupun pelatihan dasar untuk meningkatkan kompetensi tenaga Trantibum dalam menegakan perda perkada.

Adapun penyebab Pelanggaran Perda Perkada terbanyak pada tahun 2025 adalah seperti pada table dibawah ini :

Tabel III.14
Penyebab Ketenteraman Ketertiban Umum
Tahun 2025

No	Penyebab	Jumlah	%
1	2	3	4
1	Adanya Pelanggaran Perda Perkada	1.019 Kegiatan	
2	Meningkatnya Gangguan Ketertiban Umum	106 Kegiatan	
3	Adanya Pengaduan dari Masyarakat	119 Kegiatan	
	TOTAL	1.244 Kegiatan	

Adapun sebaran Penyebab Ketenteraman Ketertiban Umum Tahun 2025 pada tahun 2025 adalah seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel III.15
Sebaran Penyebab Ketenteraman Ketertiban Umum
Tahun 2025

No	Penyebab	Kegiatan Yang Dilaksanakan	Jumlah Kegiatan
1	2	3	4
1	Adanya Pelanggaran Perda Perkada	1. Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar 2. Patroli Pengawasan 3. Penertiban Reklame 4. Penanganan Perda Perkada 5. Pengawasan Perda Perkada	90 151 563 123 92
2	Meningkatnya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Penanganan Unjuk Rasa 2. Deteksi Dini 3. Pengamanan	21 6 79
3	Adanya Pengaduan dari Masyarakat	1. Pengaduan Masyarakat	119
TOTAL			1.244

Berdasarkan Tabel III.15 Penyebab Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masih didominasi oleh adanya pelanggaran terhadap Perda dan Perkada.

Pada faktor adanya pelanggaran Perda/Perkada, kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi penertiban rumah liar dan kios liar sebanyak 90 kegiatan, patroli pengawasan 151 kegiatan, penertiban reklame 563 kegiatan, penanganan Perda Perkada 123 kegiatan, serta pengawasan Perda Perkada 92 kegiatan. Tingginya angka penertiban reklame menunjukkan bahwa pelanggaran pada sektor tersebut masih cukup signifikan dan memerlukan pengawasan intensif.

Selanjutnya, pada faktor meningkatnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, telah dilaksanakan kegiatan penanganan unjuk rasa sebanyak 21 kegiatan, deteksi dini 6 kegiatan, dan pengamanan 79 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengamanan dan deteksi dini terus dilakukan untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah.

Selain itu, faktor adanya pengaduan dari masyarakat juga menjadi perhatian, dengan jumlah penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 119 kegiatan. Hal ini

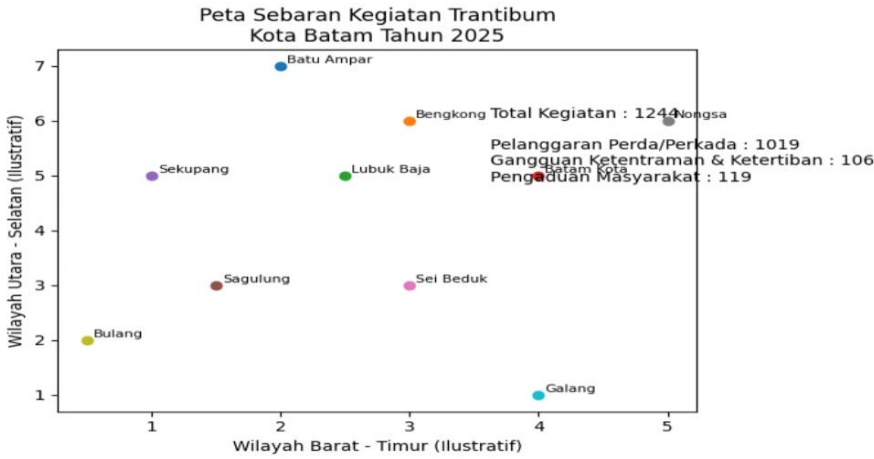
mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan potensi gangguan ketertiban umum.

Secara keseluruhan, total kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 berjumlah 1.244 kegiatan, yang menunjukkan komitmen dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui langkah penertiban, pengawasan, pengamanan, serta respons terhadap pengaduan masyarakat.

Gambar III.3
Peta Sebaran Kegiatan Satpol PP
Di Kota Batam Tahun 2025

PETA SEBARAN KEGIATAN TRANTIBUM

Kota Batam Tahun 2025



Sumber Data: Rekapitulasi Kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025

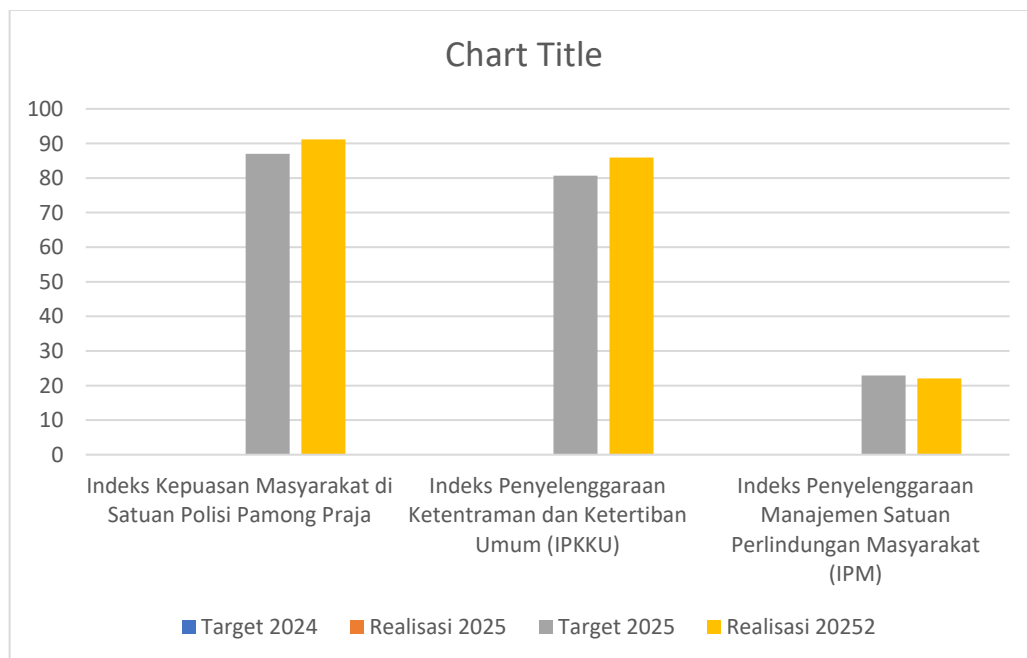
Terdapat perbedaan indikator kinerja pada Tahun 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka harmonisasi dengan dokumen perencanaan strategis terbaru, perubahan regulasi, serta penyempurnaan metodologi pengukuran kinerja guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pencapaian sasaran, hal ini dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel III.16
Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran
Tahun 2024-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		%	2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks	-	-	-	87	91.18	104.80%
2	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	-	-	-	80.67	85.93	106.52%
3	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	Indeks	-	-	-	22.89	22.02	96.20%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Gambar Grafik III.4
Gambaran Perbandingan indikator Kinerja Sasaran
Periode Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Berdasarkan Tabel III.16 tentang Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024–2025, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 seluruh indikator kinerja telah memiliki target dan realisasi yang terukur, sedangkan tahun 2024 tidak ada target dan tidak ada realisasi karena perbedaan indikator.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 87 dan terealisasi sebesar 91,18 atau mencapai 104,80%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Satpol PP Kota Batam telah melampaui target yang ditetapkan.

Selanjutnya, Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 80,67 dengan realisasi sebesar 85,93 atau 106,52%. Capaian ini menunjukkan kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum berjalan sangat baik dan melebihi target yang direncanakan.

Sementara itu, Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 22,89 dengan realisasi sebesar 22,02 atau 96,20%. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian tersebut masih berada dalam kategori baik dan menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen Satlinmas berjalan cukup optimal, namun masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek pendukung.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Satpol PP Kota Batam tahun 2025 menunjukkan tren positif, dengan dua indikator melampaui target dan satu indikator mendekati target. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Batam.

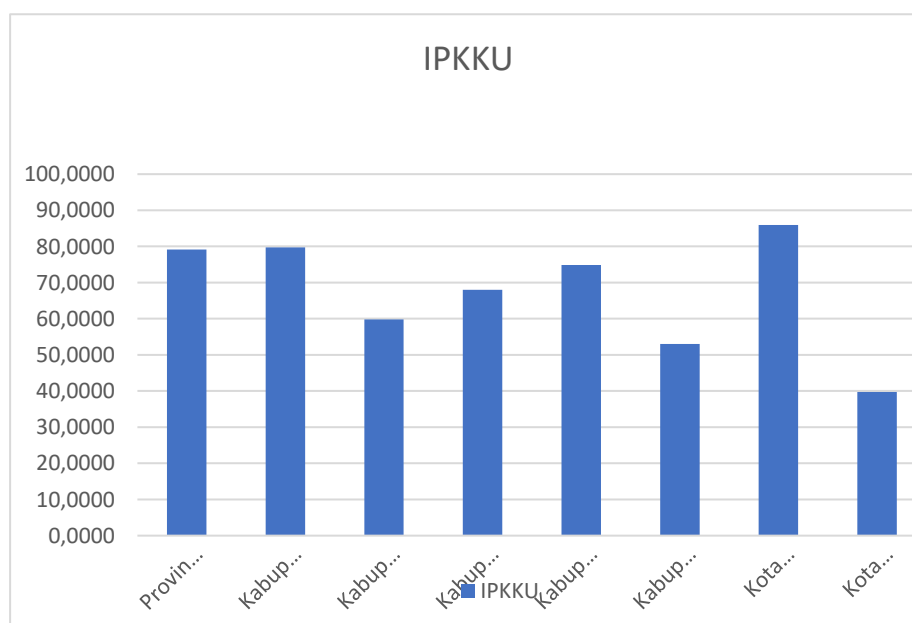
Tabel III.17
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Dibanding Target Akhir Renstra Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra Tahun 2025	Persentase Capaian Kinerja (%)	Kesenjangan (realisasi-target)
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks	91.18	87	104.80%	4.18
2	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	85.93	80.67	106.52%	6.52
3	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	Indeks	22.02	22.89	96.20%	-3,80

Apabila dilihat dari tabel diatas maka pencapaian indikator kinerja sasaran sampai dengan tahun 2025 sudah melebihi target, bila dibandingkan dengan Target akhir Renstra yang ditetapkan.

Sebagai perbandingan, Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum [IPKKU] Kepulauan Riau pada tahun 2025, dari beberapa kota /kabupaten, sebanyak 8 Jika dibandingkan dengan kabupaten / kota ada di Provinsi Kepulauan Riau maka Kota Batam menempati urutan ke 1 dari 8 Kabupaten/Kota dengan Jumlah 85.9289 paling banyak. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik III.5
Perbandingan Indikator Kinerja [IPKKU] Kota Batam dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Program yang direncanakan untuk pencapaian indikator sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam ada 2 program yaitu :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Uraian terkait program yang direncanakan untuk pencapaian indikator sasaran Program yaitu terwujudnya penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum, dan Perda perkada, dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel III.18
Indikator dan Realisasi Kinerja Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Program
Tahun 2025

No	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP PD		Nilai	70.55	70.55	100
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		Indeks	87	91.18	104.80
3	Terciptanya Wilayah yang aman dan kondusif	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase penyelenggara an trantibum yang di laksanakan oleh satpol pp		Persen	100	100	100%
4	Meningkatnya kualitas SDM anggota satpol pp		2. persentase jumlah anggota satpol pp yang telah mengikuti diklat dasar		Persen	19.57	19.02	97.17%
5	Terwujudnya penegakan		3. Persentase perda perkada		Persen	100	100	100%

No	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	perda dan perkara		yang di tegakan					
6	terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif		4. Persentase penyelenggaraan satlimas		Persen	9.09	5.45	60.01

Apabila dilihat dari tabel diatas maka realisasi dari indikator kinerja Program untuk pencapaian sasaran program adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada dan indikator kinerjanya adalah Persentase penyelenggaraan trantibum yang di dilaksanakan oleh satpol pp, persentase jumlah anggota satpol pp yang telah mengikuti diklat dasar, Persentase perda perkara yang di tegakan, Persentase penyelenggaraan satlimas sebanyak 4 indikator semuanya telah melebihi/kurang target yang ditetapkan.

Faktor pendorong tercapainya untuk pencapaian indicator sasaran program adalah:

- a. Telah dilakukannya Monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja program Ketenteraman Ketertiban Umum secara berkala;
- b. Telah dilaksanakan nya rekonsiliasi terhadap data capaian kinerja operasional lapangan dan penegakan Perda/Perkada;
- c. Peningkatan kinerja dalam pelayanan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM diklatsar, dan telah dilaksanakannya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional secara bertahap.
- d. Adanya pencapaian kinerja Penyelenggaraan Trantibum dan Penegakan Perda Perkada pemerintah kota Batam.
- e. Terbentuknya tim Terpadu Kota Batam, dan Tim Sakip
- f. Adanya sumber Daya Manusia yang berkopeten

Kegiatan yang direncanakan untuk pencapaian sasaran ini ada 9 (sembilan) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
8. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
9. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Uraian terkait kegiatan yang direncanakan untuk pencapaian indikator sasaran program dapat dilihat pada table sebagai :

Tabel III.19
Indikator dan Realisasi Kinerja Kegiatan
Sasaran Program
Indikator Kinerja
Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Persentase	100	100	100
2	Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase	86.05	86.05	100
3	Terlaksananya layanan administrasi umum Satuan Polisi Pamong Praja	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Persentase	100	100	100
4	Terlaksananya pelaksanaan	Kegiatan Pengadaan	Persentase realisasi	Persentase	100	94.68	94.68

No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	pengadaan BMD Satuan Polisi Pamong Praja	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan				
5	Tersedianya jasa penunjang urusan Satuan Polisi Pamong Praja	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Persentase	100	95.65	95.65
6	Terlaksananya pemeliharaan BMD Satuan Polisi Pamong Praja	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Persentase	100	100	100
7	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Strategi dalam Penyelenggaraan trantibum	Persentase	100	100	100
	Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) dalam menjalankan tugas dan fungs		Persentase Capaian Strategi, Peningkatan efektivitas Pelayanan dan Pemberdayaan SDM dalam Penyelenggaraan Satlinmas	Persentase	9.09	5.45	60.01
	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme anggota Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas penegakan Perda dan ketertiban umum		Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP	Persentase	19.57	19.02	97.17

No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung Trantibum untuk mendukung tugas operasional Satpol PP		Persentase jenis sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan	Persentase	100	100	100
	Melindungi dan memulihkan kondisi warga yang terdampak langsung akibat penegakan hukum atas pelanggaran trantibum dan Perda/Perkada		Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase	100	100	100
8	Meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Capaian Strategi dalam Penegakan Perda Perkada	Persentase	100	100	100
9	Meningkatkan kapasitas Satpol PP melalui pemenuhan jumlah dan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Satpol PP	Persentase	6.04	6.36	105.20

Sumber data : Satpol PP Kota Batam

Apabila dilihat dari tabel diatas, maka seluruh indikator kegiatan telah mencapai realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun untuk efisiensi penggunaan sumber daya, dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel III.20
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian Indikator Sub Kegiatan
Tahun 2025

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		%	Tahun 2025		%	Efisiensi
			Target	Realisasi		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	111	111	100%	623.922.000	606.744.200	97.25	-
2	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	9	9	100	32.590.000	14.175.000	43.49	-
3	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3	3	100%	62.284.000	56.486.860	90.69	-
Jumlah						718.796.000	677.406.060	94.24	

Sumber Data Satpol PP Kota Batam

Berdasarkan tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Indikator Sub Kegiatan Tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa seluruh sub kegiatan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, dengan tingkat capaian output sebesar 100%. Namun demikian, dari sisi penggunaan anggaran tidak semua terealisasi di karenakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring (Online).

Pada sub kegiatan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, target dan realisasi indikator kinerja sebanyak 111 pegawai atau 100%. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp623.922.000 dengan

realisasi sebesar Rp606.744.200 atau 97,25%. Hal ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan optimal dan sisa anggaran sebesar 2,75%.

Pada sub kegiatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar, target dan realisasi sebanyak 9 aparaturnya atau 100%. Anggaran sebesar Rp32.590.000 terealisasi Rp14.175.000 atau 43,49%. karena pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan daring (on line).

Selanjutnya, pada sub kegiatan Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas, target dan realisasi sebanyak 3 laporan atau 100%. Anggaran sebesar Rp62.284.000 terealisasi Rp56.486.860 atau 90,69%. Hal ini menunjukkan kegiatan berjalan efektif dengan sisa anggaran sebesar 9,31%.

Secara keseluruhan, capaian indikator sub kegiatan tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik karena seluruh target output tercapai 100%, serta penggunaan anggaran berada di bawah pagu yang ditetapkan.

dokumentasi pelaksanaan Sub kegiatan dalam pencapaian indikator Sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional



2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



Tabel III. 21
Analisis Pencapaian Sasaran 1 : Indikator Kinerja
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja (Poin)	87	91.18	104.80%
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perda Perkada	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (indeks)	80.67	85.93	106.52%
3		Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM) (indeks)	22.89	22.02	96.20%

Adapun Faktor pendorong tercapainya target indikator ini adalah ;

- Terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi standar pelayanan, peningkatan respons pengaduan masyarakat, serta penguatan kapasitas aparatur Satpol PP.
- Adanya dukungan dan komitmen pimpinan, Perangkat Daerah terkait serta sinergitas dengan unsur TNI/Polri dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Realisasi indikator kinerja Tahun 2025 secara umum telah melebihi target yang ditetapkan, khususnya pada indikator IKM dan IPKKU. Hal ini menunjukkan bahwa

penyelenggaraan pelayanan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Perda/Perkada berjalan secara efektif dan akuntabel.

Meskipun demikian, pada indikator IPM masih terdapat selisih sebesar 3,80% dari target, sehingga ke depan perlu dilakukan penguatan pada aspek manajemen dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat agar capaian dapat optimal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP Kota Batam.

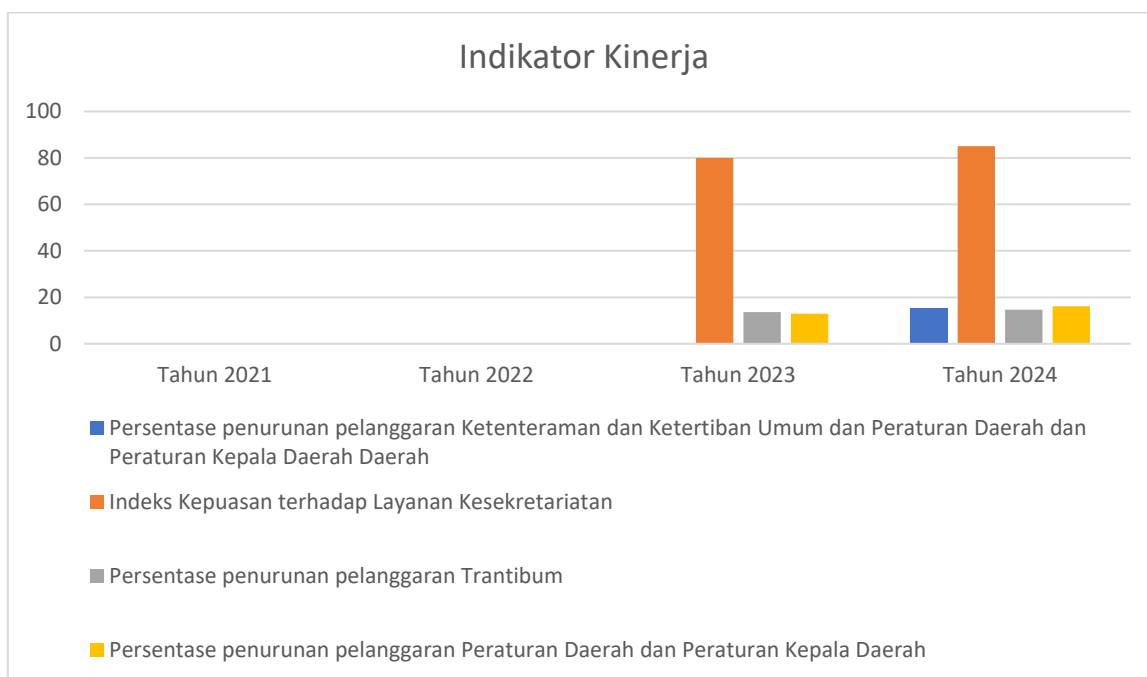
Tabel III.22
Perbandingan Indikator Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		%	2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks	-	-	-	87	91.18	104.80%
2	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	-	-	-	80.67	85.93	106.52%
3	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	Indeks	-	-	-	22.89	22.02	96.20%

Sumber data : laporan hasil olahan perencanaan program tahun 2025

Gambaran Jumlah Indikator periode tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar Grafik III.6
Jumlah indikator Periode Tahun 2021-2024



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah indikator mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai dengan 2024 .

Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian untuk indikator cakupan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana telah direncanakan dalam target akhir Renstra perubahan 2021-2026 adalah sebagai berikut :

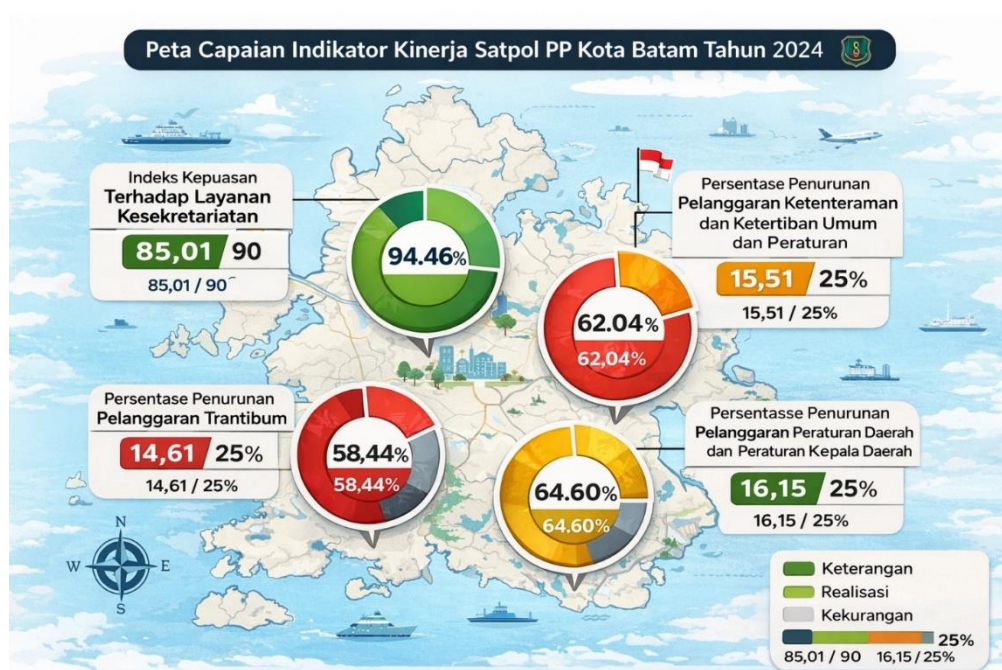
Tabel III.23
Pencapaian Indikator Kinerja
Dibandingkan Target Akhir Renstra
Kota Batam Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja	Kesenjangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan	Persentase	15.51	25%	62.04	9.49

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja	Kesenjangan
1	2	3	4	5	6	7
	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					
2	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Indeks	85.01	90	94.46	4.99
3	Persentase penurunan pelanggaran Trantibum	Persentase	14.61	25	58.44	10.39
4	Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase	16.15	25	64.60	8.85

Apabila dilihat dari tabel diatas maka pencapaian indikator cakupan Indikator Kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sudah sesuai dengan Target akhir Renstra yang ditetapkan, terdapat selisih sebesar 9,49%. Untuk visualisasi cakupan capaian indikator kinerja Satpol PP di Kota Batam dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar III.7
Peta Sebaran Pencapaian Indikator Kinerja
Dibandingkan Target Akhir Renstra
Di Kota Batam Tahun 2025



Indikator Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sifatnya sangat spesifik disesuaikan dengan tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Batam, permasalahan dan isu-isu strategis di Kota Batam, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, hal ini menyebabkan indikator Kinerja yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam berbeda dengan indikator yang dimiliki instansi lain sehingga indikator ini tidak dapat dibandingkan kinerjanya dengan instansi lain.

Program yang direncanakan untuk pencapaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Uraian terkait program dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel III.24
Indikator dan Realisasi Kinerja Program
Sasaran Program Satpol PP Kota Batam
Tahun 2025

No	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai SAKIP PD	100	Nilai	70.55	70.55	100
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	104.80	Indeks	87	91.18	104.80
3	Terciptanya Wilayah yang aman dan kondusif	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase penyelenggaraa n trantibum yang di laksanakan oleh satpol pp	100%	Persen	100	100	100%
4	Meningkatnya kualitas SDM anggota satpol pp		2. persentase jumlah anggota satpol pp yang telah mengikuti diklat dasar	97.17%	Persen	19.57	19.02	97.17%
5	Terwujudnya penegakan		3. Persentase perda perkada yang di tegakan	100%	Persen	100	100	100%

No	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	perda dan perkara							
6	terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif		4. Persentase penyelenggaraan satlimas	60.01	Persen	9.09	5.45	60.01

sumber : Laporan Hasil olahan Perencanaan Program Data tahun 2025

Apabila dilihat dari tabel diatas maka pencapaian dari indikator kinerja Program ada yang sesuai target dan ada yang melebihi, atau pun kurang dari target yang ditetapkan. Faktor pendorong tercapainya target indikator program ini adalah :

1. Komitmen dan Dukungan Pimpinan Daerah
2. Peningkatan Intensitas Patroli dan Operasi Penegakan Perda
3. Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor
4. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Personel
5. Sosialisasi dan Edukasi Peraturan Daerah
6. Pemanfaatan Data dan Pemetaan Daerah Rawan Trantibum
7. Partisipasi dan Peran Aktif Masyarakat
8. Dukungan Sarana dan Prasarana Operasional

Kegiatan yang direncanakan untuk pencapaian sasaran ini adalah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteramaan dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator kinerja kegiatan Persentase capaian strategi dalam penyelenggaraan trantibum dan perda perkara sebesar 100%. Uraian lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.25
Indikator Kinerja Kegiatan dan Realisasi
Sasaran Kegiatan Satpol PP Kota Batam
Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Persentase	100	100

No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
2	Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase	86.05	86.05
3	Terlaksananya layanan administrasi umum Satuan Polisi Pamong Praja	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Persentase	100	100
4	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Satuan Polisi Pamong Praja	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Persentase	100	94.68
5	Tersedianya jasa penunjang urusan Satuan Polisi Pamong Praja	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Persentase	100	95.65
6	Terlaksananya pemeliharaan BMD Satuan Polisi Pamong Praja	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Persentase	100	100
7	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Strategi dalam Penyelenggaraan trantibum	Persentase	100	100
	Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) dalam menjalankan tugas dan fungsi		Persentase Capaian Strategi, Peningkatan efektivitas Pelayanan dan Pemberdayaan SDM dalam Penyelenggaraan Satlinmas	Persentase	9.09	5.45
	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme anggota Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas penegakan Perda dan ketertiban umum		Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP	Persentase	19.57	19.02

No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung Trantibum untuk mendukung tugas operasional Satpol PP		Persentase jenis sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan	Persentase	100	100
	Melindungi dan memulihkan kondisi warga yang terdampak langsung akibat penegakan hukum atas pelanggaran trantibum dan Perda/Perkada		Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase	100	100
8	Meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Capaian Strategi dalam Penegakan Perda Perkada	Persentase	100	100
9	Meningkatkan kapasitas Satpol PP melalui pemenuhan jumlah dan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Satpol PP	Persentase	6.04	6.36

Sumber : Laporan Hasil olahan Subkoor Perencanaan Program tahun 2025

Apabila dilihat dari tabel diatas maka pencapaian dari indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteramaan dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tahun 2025 sudah sesuai target, yaitu sebesar 100%.

1. Indikator Kinerja Strategis adalah ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai tercapainya tujuan dan sasaran strategis organisasi dalam periode jangka menengah (biasanya 5 tahun/Renstra)..
2. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan

tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat secara terintegrasi dalam satu periode tertentu.

Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk menentukan Tingkatan Penurunan Pelanggaran Trantibum serta Perda Perkada

3. Indeks Pelayanan Publik Satpol PP Kota Batam Kategori Baik

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Batam telah mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi kepuasan masyarakat dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam Permenpan No 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran :

1. Mendukung partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan public
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Adapun Manfaat dilakukannya SKM antara lain :

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan public secara periodik
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan masyarakat
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan
6. Bagi masyarakat, dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Kualitas pelayanan publik sebagai tujuan akhir dari pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi sasaran yang diindikasikan dengan tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Nilai IKM dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dari sejumlah pernyataan ukuran pelayanan publik yang diberikan kepada sejumlah responden yang berkunjung ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam periode tertentu .

Cara perhitungannya adalah : Jumlah rata rata indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap kinerja pelayanan yang diberikan pada unit yang melakukan survey kepuasan masyarakat dibagi dengan Jumlah seluruh unit yang melakukan survey kepuasan

masyarakat dikali 100%.

Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikannya, terdiri dari 9 unsur :

- i. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
- ii. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
- iii. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
- iv. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
- v. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
- vi. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman.
- vii. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan
- viii. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
- ix. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.
- x. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses(usaha,pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Tujuan dari dilakukannya survey kepuasan di masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam

2. memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
4. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
5. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
6. Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan upaya dalam pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Indeks Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kategori Baik merupakan indikator baru yang ada di dalam dokumen renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Cara perhitungannya adalah : dengan metode rata rata atau pembobotan sesyau tingkat prioritas masing masing indikator Untuk definisi dan beberapa unsur penilaian SKM kategori baik mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dimana nilai interval baik ada pada kisaran 76,61-88,30. Adapun kriteria IKM Baik dalam Perencanaan Strategis Kota Batam adalah minimal 85,00.

Nilai IKM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 91.18 secara keseluruhan pada tahun 2024 adalah sebesar 86. Sedangkan nilai IKM di aplikasi E-SKM yaitu 00,00. Perbedaan angka realisasi IKM ini disebabkan karena :

Perhitungan Nilai IKM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam secara keseluruhan dilakukan secara manual menggunakan aplikasi exel dengan memasukan data yang diinput di aplikasi E-SKM di katagori Perangkat Daerah dan Non Perangkat Daerah dan laporan hardcopy dari unit yang melakukan survey kepuasan masyarakat, kemudian ditotalkan dan dibagi dengan jumlah unit yang melakukan survey sehingga untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam diperoleh nilai IKM sebesar 91.18

1. Perhitungan Nilai IKM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam pada aplikasi E-SKM baru dinilai dari 1 katagori yaitu Katagori Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Adapun langkah-langkah untuk memperoleh nilai indikator Indeks Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kategori Baik adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Katagorisasi Nilai IKM dengan katagori sangat baik , baik, dan kurang baik
2. Hitung berapa jumlah unit yang memiliki nilai IKM katagori baik dan sangat baik
3. Lakukan perhitungan menggunakan formulasi : Jumlah unit pelayanan kategori "Baik" dan "Sangat Baik" dari hasil survei kepuasan masyarakat dibagi jumlah seluruh unit yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat di kali 100.

Berikut adalah Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Indeks Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kategori Baik :

Tabel III.26
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Indeks Pelayanan Publik
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kategori Baik
Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	2	3	4	5
1	Satuan Polisi Pamong Praja	91.18	A	Sangat Baik

Sumber : Laporan Hasil olahan Subkoor Program Data dan Informasi tahun 2025

Nilai IKM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam pada tahun 2025 dari 1 unit yang dilakukan survey kepuasan masyarakat diperoleh Nilai IKM 91.18 (104.79) .

Dari 1 unit tersebut , 1 unit (104.79%) memiliki kinerja unit pelayanan “Sangat Baik” dan 1 unit (104.79%) memiliki kinerja unit pelayanan “Baik” sehingga diperoleh nilai indikator Indeks Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kategori sangat baik , hal ini mengandung makna bahwa dari 1unit yang sudah melakukan survei kepuasan semuanya mendapatkan nilai baik dan sangat baik dari responden yang mengisi survey. Hal ini tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel III.27
Analisis Pencapaian Sasaran :
Indikator Indeks Pelayanan Publik Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Kategori Baik Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025		%
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	Poin	87	91.18	104.79

Sumber Data : Sub bagian umum dan kepegawaian

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator Indeks Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kategori Sangat Baik adalah 104.79%, telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 87.

Adapun faktor pendorong tercapainya target ini adalah :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai pemberi pelayanan Penegakan Perda Perkada sudah terakreditasi. Di Kota Batam dapat memberikan gambaran bahwa Standar Administrasi dan Manajemen, Standar Program dan Standar Pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam telah terpenuhi . Hal ini merupakan proses perbaikan mutu kinerja secara berkesinambungan yang tentunya akan berimplikasi kepada meningkatnya kepuasan dari pengguna layanan Publik yaitu masyarakat.
- b. Tersedianya anggaran untuk perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana Satpol PP Kota Batam

dari 1 unit semuanya telah melakukan survey kepuasan masyarakat tetapi belum menginputkan ke dalam aplikasi E-SKM, hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala sebagai berikut :

- a. Adanya kendala teknis dari aplikasi sehingga proses penginputan tidak dapat dilaksanakan
 - b. Terbatasnya sumberdaya manusia untuk menginput hasil survey ke aplikasi
- Untuk mengantisipasi kendala tersebut agar tidak terulang kembali di tahun berikutnya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait adanya kendala teknis dari aplikasi

- b. Membuat SK Penetapan Petugas Penginputan IKM kedalam e-SKM
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

Nilai IKM dan Indikator Indeks Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kategori Baik Tahun 2025 bila dibandingkan dengan hasil capaian pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III.28
Perbandingan IKM dan Indeks Pelayanan Publik
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Kategori Baik
Tahun 2025

No	Nama	Nilai Ikm		Mutu Pelayanan		Kinerja Unit	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
U1	Persyaratan		91.07				
U2	Sistem Mekanisme dan Prosedur		88.80				
U3	Waktu Penyelesaian		92.37				
U4	Biaya/Tarif		92.05				
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan		93.83				
U6	Kompetensi Pelaksana		92.05				
U7	Perilaku Pelaksana		89.12				
U8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan		89.61				
U9	Sarana dan Prasarana		91.72				
	Jumlah	86	91.18	A	A	Baik	Sangat Baik
	Nilai Rata Rata IKM		91.17				
	Indeks Pelayanan Publik Satpol PP Kategori Sangat Baik		91.17				

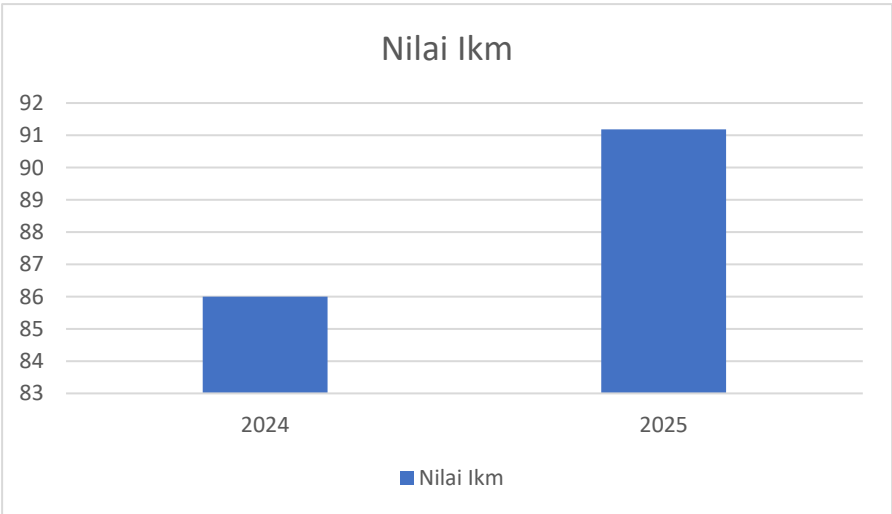
Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai IKM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mengalami peningkatan sebesar 5.2 dari 86 pada tahun 2024 menjadi 91.18 pada tahun 2025.

Begitu juga dengan Indeks Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kategori Baik mengalami peningkatan sebesar 5.2 dari 86 pada tahun 2024 menjadi 91.18 pada tahun 2025. Ada 1 Unit (106.02%) mengalami peningkatan, 1 unit (106.02%) tetap dan 1Unit (106.02%) mengalami kenaikan. Perbandingan nilai IKM dan Indeks Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kategori

Sangat Baik dapat dilihat lebih jelas pada grafik dibawah ini :

Gambar Grafik III.8
Perbandingan IKM dan Indeks Pelayanan Publik
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Kategori Sangat Baik
Tahun 2024 - 2025



Sumber : Laporan Hasil olahan Subkoordinator Program Data dan Informasi tahun 2025

Berdasarkan hasil analisis data Laporan IKM 1Unit yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dari 9 unsur yang dinilai yaitu : Persyaratan pelayanan, Prosedur pelayanan, Kecepatan tugas, Kemampuan tugas, Kesopanan dan keramahan, Kenyamanan unit kerja Kewajaran biaya, Keadilan pelayanan, dan Keamanan unit pelayanan didapatkan hasil pada table sebagai berikut:

Tabel III.29
Analisis Data Laporan IKM Berdasarkan Data Tiap Unsur Pelayanan
Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Satpol PP Kota Batam	91.07	88.80	92.37	92.05	93.83	92.05	89.12	89.61	91.72
	Jumlah Rata Rata	3.64	3.55	3.69	3.68	3.75	3.68	89.12	89.61	91.72

Sumber : Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa unsur yang tertinggi dari hasil Survey kepuasan masyarakat adalah tentang:

1. Produk spesifikasi jenis pelayanan (U5)
2. Waktu penyelesaian (U3)
3. Kompetensi pelaksana (U6)

Adapun Unsur yang terendah dalam survei kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)
2. Perilaku pelaksana (U7)
3. Sistem, mekanisme dan prosedur (U2)

Untuk Mendorong agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai penyelenggara pelayanan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka dilakukan beberapa upaya diantaranya adalah dengan pengelolaan data Pengaduan dari Masyarakat. Dibawah ini adalah rincian Pengelolaan data Pengaduan masyarakat

Tabel III.30
Pengelolaan Data Pengaduan Masyarakat
Tahun 2025

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pelanggaran	Tindak Lanjut Pengaduan
1	2	3	4	
1	Disposisi Walikota Tembesi Tower	Desember 2024	Bangunan Liar	ditindaklanjuti
2	RT/RW 003/003 Komplek Pasar Baru Nagoya	Januari 2025	Permintaan Warga Relokasi	Ditindaklanjuti
3	Kantor Hukum Rudianto Dan Rekan	Januari 2025	RDPU Terkait Permasalahan Lahan Di RT 004 RW 008 Kel. Sei Lekop Kec. Sagulung	Ditindaklanjuti
4	Disposisi Asisten I Rw 008 Perum Marina Green	Januari 2025	Bangunan Liar	ditindaklanjuti
5	Disposisi Walikota (PPC LI-Bapak)	Januari 2025	Mohon Penertiban Lingkungan	Ditindaklanjuti
6	DBM SDA	Februari 2025	Penertiban Papan Reklame	ditindaklanjuti
7	PT. Wira Baja Industri	Februari 2025	Penertiban Bangunan Warung Di Row 30 Akses Jalan Keluar	ditindaklanjuti
8	Rudianto dan Rekan	Februari 2025	Pengaduan Dan Permohonan Perlindungan Hukum	ditindaklanjuti
9	PT. Tanjung Piayu Makmur	Februari 2025	Klarifikasi Terkait Permohonan Kompensasi Atau Ganti Rugi Oleh Warga Terdampak	ditindaklanjuti
10	PT Makmur Elok Graha	Februari 2025	Laporan Temuan Indikasi Kegiatan Usaha Ilegal	Ditindaklanjuti
11	Tim Terpadu	Februari 2025	Perintah Bongkar (Tembusan) Pemilik Bangunan Dan Tanam Tumbuh Di Pl 22405158 Kel. Sambau	Ditindaklanjuti

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pelanggaran	Tindak Lanjut Pengaduan
1	2	3	4	
12	Kelurahan Belian	Februari 2025	Permintaan Penertiban PK5 Wilayah Kel. Belian Kec. Batam Kota	ditindaklanjuti
13	Kelurahan Sungai Panas	Februari 2025	Permohonan Pengawasan	ditindaklanjuti
14	Disposisi Walikota (Pt. Tanjung Piayu Makmur)	Februari 2025	Klarifikasi Terkait Permohonan Kompensasi /Ganti Rugi Oleh Warga Terdampak	Ditindaklanjuti
15	Walikota Batam(Kantor Hukum Rudianto Dan Rekan)	Februari 2025	Pengaduan Dan Permohonan Perlindungan Hukum	Ditindaklanjuti
16	Disposisi Walikota Pt. Batamas Mandiri Perkasa	Februari 2025	Permohonan Penertiban Bangunan Liar	Ditindaklanjuti
17	Disposisi Walikota (Warga Pemilik Ruko Putra Jaya)	Februari 2025	Pengaduan Kios Liar Permanen Sepanjang Pertokoan Putra Jaya Tanjung Uncang	ditindaklanjuti
18	Disposisi Walikota (Danamas)	Maret 2025	Keberatan Terhadap Papan Reklame	ditindaklanjuti
19	Kelurahan Kibing	Maret 2025	Titik Lokasi Pembuangan Sampah Liar Di Kel. Kibing	ditindaklanjuti
20	Sigma Aurora Property	Maret 2025	Penertiban Pedagang Liar Dan Parkir Liar Di Row 30	ditindaklanjuti
21	Pt. Permata Riau Sejati	Maret 2025	Permohonan Penyelesaian Pembebasan Ruli	ditindaklanjuti
22	Pt. Satria Batam Sukses A.N Eka Saputra	Maret 2025	Penertiban Bangunan Liar	ditindaklanjuti
23	Sigma Aurora Property	Maret 2025	Penertiban Pedagang Liar Dan Parkir Liar Di Row 30	ditindaklanjuti
24	Disposisi Aspem (Asisten Land)	Maret 2025	Permohonan Penertiban PKL/ Pasar Kaget Didepan Perumahan Emirates Residence	Ditindaklanjuti
25	Pt. Permata Riau Sejati	Maret 2025	Permohonan Penyelesaian Pengosongan Lahan	ditindaklanjuti
26	Pt.Starindo Ariya Property	Maret 2025	Permohonan Bantuan Pengosongan Lahan	ditindaklanjuti
27	Disposisi Walikota (Pt.Starindo Ariya Properrti)	Maret 2025	Permohonan Bantuan Pengosongan Lahan	ditindaklanjuti
28	Pt. Indo Mega Sentosa	April 2025	Permohonan Pembebasan Lahan Dari Bangunan Liar	Ditindaklanjuti
29	Disposisi Walikota Jhon Asron Purba Advokad	April 2025	Permohonan Dan Pemberitahuan	ditindaklanjuti
30	Kelurahan Bengkong Indah	April 2025	Penertiban Lapak Jualan Jl. Yos Sudarso III	ditindaklanjuti
31	BP Batam	April 2025	Penertiban Titik Reklame Pada Aset Tetap Tanah Pemko Batam	ditindaklanjuti
32	Disposisi Wakil Walikota (Rusok)	April 2025	Permohonan Kompensasi Ganti Rugi Kebun	ditindaklanjuti
33	Kelurahan Belian	Mei 2025	Permintaan Penertiban Bangunan Liar	ditindaklanjuti
34	Taman Raya Tahap Iii	April 2025	Permohonan Pembubaran Pasar Liar	ditindaklanjuti
35	Kelurahan Belian	Februari 2025	Laporan Masyarakat Terkait Pk5 Dan Cucian Motor	Ditindaklanjuti
36	Kelurahan Belian	Februari 2025	Laporan Masyarakat Terkait Pk5 Yang Jualan Permanen Di Bahu Jalan	Ditindaklanjuti
37	Dinas Bina Marga Dan Sda	Mei 2025	Penanganan Bangunan Bermasalah Pada Kegiatan DBMSDA Kota Batam T.A 2025	Ditindaklanjuti
38	DBMSDA	Mei 2025	Permohonan Bantuan Penertiban Papan Reklame	ditindaklanjuti
39	Golden Teleshop	Mei 2025	Surat Himbauan	Ditindaklanjuti
40	Pt. Sin Trans Indo Manufacturing Dan Rekayasa	Mei 2025	Permohonan Penertiban Atas Penguasaan Lahan Diatas PL Perusahaan	Ditindaklanjuti
41	Disposisi Wakil Walikota (Astaka Land)	Mei 2025	Surat Keluhan Warga Emirates Residence Dan Lampiran Ttd Warga	Ditindaklanjuti
42	Rw 18 Bengkong Telaga Indah Kel. Sadai	Mei 2025	Permohonan Audensi	Ditindaklanjuti

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pelanggaran	Tindak Lanjut Pengaduan
1	2	3	4	
43	Pt.Tria Talang Emas	Mei 2025	Permohonan Penertiban Ruli Dan Kandang Ternak Babi	ditindaklanjuti
44	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	Mei 2025	Pengamanan Fisik Asset Tetap Tanah Pemko Batam	ditindaklanjuti
45	Kecamatan Batam Kota	Mei 2025	Dukungan Penertiban Bangunan Liar Dalam Rangka Normalisasi Dan Pelebaran Jalan	Ditindaklanjuti
46	Dinas Kesehatan	Mei 2025	Permohonan Bantuan Pengosongan Lahan	ditindaklanjuti
47	Disposisi Walikota (Pt. Menara Karya Asri)	Mei 2025	Permohonan Penertiban Kios Dan Gerobak Liar	ditindaklanjuti
48	Disposisi Walikota (Kantor Hukum Herly Dan Rekan)	Mei 2025	Permohonan Penertiban Dan Fasos Masyarakat	Ditindaklanjuti
49	Kecamatan Batam Kota	Mei 2025	Permintaan Penertiban Bangunan Liar	Ditindaklanjuti
50	Kecamatan Nongsa	Mei 2025	Permohonan Penertiban Bangunan Ilegal Di Wilayah Kecamatan Nongsa	Ditindaklanjuti
51	Kecamatan Sagulung	Mei 2025	Tindak Lanjut Peninjauan Titik Banjir Di Kecamatan Sagulung	Ditindaklanjuti
52	A.N WARGA PERUM ODESSA RW 040	Mei 2025	Menolak Penertiban Row 15	ditindaklanjuti
53	DISPOSISI WALIKOTA A.N WARGA SIMPANG HELM KEL. BALOI PERMAI	Mei 2025	Penolakan Atas Himbauan Penggusuran	Ditindaklanjuti
54	Kelurahan Bengkong Laut	Juni 2025	Permohonan Pemindahan Bangunan Tanpa Izin	ditindaklanjuti
55	Pt. Satria Batam Sukses	Juni 2025	Permemberitahuan Dan Permohonan	ditindaklanjuti
56	DPRD Kota Batam	Juni 2025	Rapat Dengar Pendapat Umum Terkait Pembebasan Lahan Dan Ganti Rugi Warga Kampung Rawa Indah Rt 003 Rw 012 Kel. Kibing Kec. Batuaji Yang Dilakukan Ole Pt. Citra Agung Sukses Dan Serta Hal2 Yang Dianggap Perlu	Ditindaklanjuti
57	Kelurahan Teluk Tering	Juni 2025	Tembusan Himbauan Pedagang Kaki Lima	Ditindaklanjuti
58	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	Juni 2025	Permohonan Penertiban	ditindaklanjuti
59	Pt. Dwipuri Batam Tama	Juni 2025	Permohonan Penyampaian Nilai Sagu Hati	Ditindaklanjuti
60	Dispoisi Walikota Komp Ruko Panorama Indah Tiban Baru	Juni 2025	Permohonan Penertiban Lapak Pedagang Dilahan Fasum	Ditindaklanjuti
61	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	Juli 2025	Permohonan Penertiban Aset Lahan Milik Pemko Batam	ditindaklanjuti
62	Warga Perumahan Persero Tg. Sengkuang Batam	Juli 2025	Keresahan Masyarakat	Ditindaklanjuti
63	Sekretariat Daerah	Juli 2025	Penertiban Aset Tanah Milik Pemko Batam Yang dikuasai Pihak Lain	Ditindaklanjuti
64	Pt. Citra Indo Perkasa Sejati	Agustus 2025	Permohonan Penertiban Bangunan Liar (Ruli) Diatas Lahan Alokasi Pt. Citra Indo Perkasa Sejati	Ditindaklanjuti
65	Global Lawyers	Juli 2025	Somasi (Teguran) II	Ditindaklanjuti
66	Tim Terpadu	Agustus 2025	Perintah Bongkar Pt. Mawar Sharon	Ditindaklanjuti
67	Swmj Lawyer	Agustus 2025	Permohonan Klarifikasi Dan Audensi Sehubungan Dengan Pembongkaran Reklame Di Kota Batam	Ditindaklanjuti
68	Pt. Bintang Sembilan Sembilan Persada	Agustus 2025	Permohonan Pembebasan Bangunan Ruli	Ditindaklanjuti
69	Disposisi Plt. Sekda (A.N Warga RT 003/RW 008 Ruko Kwartu Perdana Blok AA dan BB	Agustus 2025	Permohonan Penertiban Bangunan Kios-Kios Liar	Ditindaklanjuti

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pelanggaran	Tindak Lanjut Pengaduan
1	2	3	4	
70	Desnata Firdaus Dan Associate	Agustus 2025	Permohonan Bantuan Pengosongan Lahan	Ditindaklanjuti
71	Kantor Firma Hukum D2 Hutagalung Dan Partner	September 2025	Peringatan Akhir Pengosongan Lahan	Ditindaklanjuti
72	Pt. Karsa Yasa Bhakti Sarana	September 2025	Bantuan Keamanan Pembongkaran Lapak Liar Di Row Jalan Depan Kantor Pt. Kybs	Ditindaklanjuti
73	Advokat/Lawyrlawyer Utusan Sarumaha Sh Dan Rekan	September 2025	Permohonan Penundaan Pelaksanaan Pengosongan Dan Pembongkaran Bangunan Row 30 Jln. Brigjen Katamso	Ditindaklanjuti
74	Disposisi Walikota (Kantor Firma Hukum D2 Hutagalung & Partner	September 2025	Peringatan Akhir Pengosongan Lahan	Ditindaklanjuti
75	Kelurahan Kabil	September 2025	Permohonan Mediasi Warga	Ditindaklanjuti
76	Dispora	September 2025	Pengamanan Fisik Aset Tetap Tanah Pemko Batam	Ditindaklanjuti
77	Hetty Matilda Sinambela	September 2025	Permohonan Penundaan Penertiban / Penggusuran Bangunan Martabe Café (Tria Talang Emas)	Ditindaklanjuti
78	Pt. Sinar Terang Cemerlang	September 2025	Permohonan Pemindahan Bangunan Liar	Ditindaklanjuti
79	Disposisi Pj. Sekda(A/N Imam Mutowali)	September 2025	Permohonan Pemindahan Bangunan Liar	Ditindaklanjuti
80	Disposisi Walikota (Kantor Advokat/Pengacara Ahmad Joni Sh & Rekan)	September 2025	Permohonan Agar Tidak Dilakukan Eksekusi Terhadap Lahan Masyarakat Bengkong Palapa li	Ditindaklanjuti
81	Disposisi Pj Sekda (Pt. Citra Indo Perkasa)	Oktober 2025	Permohonan Pembebasan Lahan	Ditindaklanjuti
82	Dinas Bina Marga Dan Sda Kota Batam	Oktober 2025	Permohonan Penertiban Bangunan Bermasalah	Ditindaklanjuti
83	Gesya Properti Sejahtera	Oktober 2025	Permohonan Tindak Lanjut Surat Perintah Bongkar	Ditindaklanjuti
84	Dispoisi Aspem (Pt. Gunung Masberlian Cemerlang)	November 2025	Permohonan Pembebasan Row Jalan	Ditindaklanjuti
85	DISPOSISI WALIKOTA (A.N Edy Susanto)	November 2025	Permohonan Pembebasan Bangunan Liar	Ditindaklanjuti
86	Disposisi Walikota (Pt. Dakota Raya Kencana)	November 2025	Permohonan Pembebasan Bangunan Gudang Dan Pagar Tembok	Ditindaklanjuti
87	Disposisi Aspem(Warga Pt. Canting Jaya)	November 2025	Keberatan Dan Penundaan Peninjauan Ulang Rencana Penggusuran	Ditindaklanjuti
88	Dispoisi Walikota (Rt 004 Rw 002 Kp. Belian Kec. Batam Kota)	November 2025	Alokasi Pemindahan Warga	Ditindaklanjuti
89	RW 01 (Kel. Batu Selicin)	6/2/2025	surat keberatan warga dengan adanya pengepul barang rongsokan	Ditindaklanjuti
90	Perum Senawangi Asri RW.08	17/02/2025	Surat Keberatan dengan adanya lapak liar di depan parit Senawangi Asri RW 08	Ditindaklanjuti
91	Kelurahan Buliang	18/02/2025	Laporan Keberatan dan tidak memberi izin terhadap lapak liar yang di bangunkan di depan parit senawangi kelurahan buliang	Ditindaklanjuti
92	UPT Puskesmas Lubuk Baja	27/02/2025	Pengaduan Ketertiban Umum	Ditindaklanjuti
93	Kelurahan Belian	27/02/2025	Laporan Masyarakat Terkait PK5 Yang Jualan di Bahu Jalan	Ditindaklanjuti
94	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah	17/03/2025	Pengaduan masyarakat terkait pelanggaran aturan jam oprasional Tempat Hiburan Malam	Ditindaklanjuti
95	Himpunan Mahasiswa Islam	21/03/2025	Pengaduan masyarakat terkait pelanggaran aturan jam oprasional Tempat Hiburan Malam	Ditindaklanjuti

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pelanggaran	Tindak Lanjut Pengaduan
1	2	3	4	
96	Disposisi Walikota (Warga Kav. Mandiri Blok E RW 12 Kel Sei Pelungut)	24/03/2025	Laporan Perbuatan Melawan Hukum	Ditindaklanjuti
97	BP Batam	24/03/2025	Laporan Informasi Pengaduan Tindakan pidana penambangan pasir ilegal di wilayah KKOP Bandara Hang Nadim dan Sambau	Ditindaklanjuti
98	Kel.Bengkong Laut	13/03/2025	Keberatan warga Komplek Green Town RW 10 atas warung tuak	Ditindaklanjuti
99	Ernita Padang	28/04/2025	Laporan dan permohonan terkait tindakan diskriminasi ras dan etnis serta perbuatan merugikan	Ditindaklanjuti
100	Kecamatan Nongsa	15/05/2025	Laporan Keberadaan Kandang Babi ilegal	Ditindaklanjuti
101	Astaka Land	19/05/2025	Surat keluhan warga emirate residence dan lampiran ttd warga	Ditindaklanjuti
102	a.n Prawoko	27/05/2025	warga komplek ruko merlion square blok c no 9 - 11 Kel.Tanjung Uncang Kec. Batu aji	Ditindaklanjuti
103	Keluraha Sungai Panas	2/6/2025	Laporan Bangunan daerah aliran sungai Kelurahan sungai panas bulan mei tahun 2025	Ditindaklanjuti
104	Warga Komplek Ruko Merlion Square Block C	23/07/2025	Pengaduan masyarakat atas keberadaan kios liar atau pun pedagang kaki 5	Ditindaklanjuti
105	Kantor Hukum Tantimin dan Rekan	28/07/2025	Pengaduan Bangunan tidak per PBG	Ditindaklanjuti
106	a.n Hamka	29/07/2025	Pengaduan Bagunan 2 Lantai kos-kosanyang tidak berizin	Ditindaklanjuti
107	Kelurahan Tanjung Uma	5/8/2025	laporan keg.reklamasi di kelurahan tg uma	Ditindaklanjuti
108	RT 004 / RW 020 Puri Selebriti	5/8/2025	Laporan keberatan adanya pembangunan jembatan di atas saluran drainase dan penimbunan barang rongsokan di depan ruko PS 21 RT 004 / RW 020 Kel Batu Besar	Ditindaklanjuti
109	Toko Sri Indah Blok I No 6	5/8/2025	Keberatan atas keberasaan video tron mohon di cabut dan di bongkar	Ditindaklanjuti
110	Kecamatan Sungai Beduk	28/08/2025	Tindak Lanjut Laporan Masyarakat terkait bangunan/kios liar yang mengganggu aktivitas keluar masuk perumahan puri agung 2	Ditindaklanjuti
111	Disposisi Walikota atas nama H.Riza Fardiansyah S.E. M.Si	28/08/2025	Adanya beberapa bangunan ruli di ROW Jalan dan di lahan H. Masfar	Ditindaklanjuti
112	Disposisi Walikota an Irnita	25/09/2025	Surat pengaduan maladministrasi satpol PP tentang pengabaian hasil rapat dengar pendapat bersama anggota komisi I DPRD Kota Batam	Ditindaklanjuti
113	Kelurahan Bukit Tempayan	29/09/2025	Keberatan Waarga atas café Liar	Ditindaklanjuti
114	Disposisi Walikota (pemilik ruko panorama indah blok A No 2)	7/10/2025	pengaduan maladministrasi satpol PP tentang pengabaian hasil rapat dengar pendapat bersama anggota komisi I DPRD Kota Batam	Ditindaklanjuti
115	Disposisi Walikota (RW Peduli Lingkungan Baloi Permai Kec. Batam Kota	16/10/2025	Surat Pengaduan Masyarakat	Ditindaklanjuti
116	Disposisi PJ Sekda RW Peduli Lingkungan Kel. Baloi Permai	16/10/2025	Surat pengaduan	Ditindaklanjuti
117	Disposisi Wawako (PK5 pasar angkasa jodoh)	20/10/2025	keberatan para pedagang untuk di gusur	Ditindaklanjuti
118	Kecamatan Nongsa	12/11/2025	Laporan keberadaan bangunan liar	Ditindaklanjuti
119	Mulyadi Z	1/12/2025	Laporan penimbunan jalan umum	Ditindaklanjuti

Sumber data Bidang trantibum dan PPUD

Adapun gambaran realisasi IKM SKPD di lingkungan Kota Batam dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel III.31
Gambaran Realisasi IKM SKPD
di Lingkungan Pemerintahan Kota Batam
Tahun 2025

Hasil Penilaian Tahun 2025									
No	Nama SKPD/Unit Kerja	Semester 1				Semester 2			
		Responden	Nilai Indeks	Nilai IKM Pelayanan	Mutu Pelayanan	Responden	Nilai Indeks	Nilai IKM Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sekretariat Daerah								
2	Dinas Komunikasi dan Informatika								
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian								
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman								
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB								
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
7	Satuan Polisi Pamong Praja	154	91.18	91.18	A	154	91.18	91.18	A
8	Dinas Pemuda dan Olah Raga								
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian								
10	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah								
11	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana								
12	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga								
13	Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang								
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
15	Dinas Perhubungan								
16	Dinas Tenaga Kerja								
17	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan								
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
19	Dinas Kesehatan								

Hasil Penilaian Tahun 2025									
No	Nama SKPD/Unit Kerja	Semester 1				Semester 2			
		Responden	Nilai Indeks	Nilai IKM Pelayanan	Mutu Pelayanan	Responden	Nilai Indeks	Nilai IKM Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Dinas Pendidikan								
21	Dinas Penanaman Modal dan PTSP								
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat								
23	Dinas Lingkungan Hidup								
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan								
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset								
28	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah								
29	Kecamatan Batam Kota								
30	Kecamatan Batu Ampar								
30	Kecamatan Lubuk Baja								
32	Kecamatan Bengkong								
33	Kecamatan Nongsa								
34	Kecamatan Batu Aji								
35	Kecamatan Sagulung								
36	Kecamatan Sekupang								
37	Kecamatan Galang								
38	Kecamatan Bulang								
39	Kecamatan Belakang Padang								
40	Kecamatan Sei.Beduk								

sumber : Laporan Hasil olahan Subkoordinator Program Data dan Informasi tahun 2024

Jika dibandingkan dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, menempati urutan kedari 40 SKPD dengan nilai 91.18(A).

Program yang direncanakan untuk pencapaian indikator sasaran ini adalah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berkaitan dengan pencapaian indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kategori Sangat Baik seperti pada tabel berikut ini.

Tabel III.32
Indikator dan Realisasi Kinerja Program
Sasaran Program
Tahun 2025

Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP PD		Nilai	70.55	70.55	100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		Indeks	87	91.18	104.80
Terciptanya Wilayah yang aman dan kondusif	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan trantibum yang di laksanakan oleh satpol pp		Persen	100	100	100%
Meningkatnya kualitas SDM anggota satpol pp		persentase jumlah anggota satpol pp yang telah mengikuti diklat dasar		Persen	19.57	19.02	97.17%
Terwujudnya penegakan perda dan perkada		Persentase perda perkada yang di tegakan		Persen	100	100	100%
terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif		Persentase penyelenggaraan satlimas		Persen	9.09	5.45	60.01

Sumber : Laporan Hasil olahan Subkoor Perencanaan Program tahun 2025

Sedangkan faktor penghambat tidak tercapaiannya indikator Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah :

- a. Pada Tahun 2025 masih belum dapat dilaksanakan optimalisasi pelayanan penanganan pelanggaran Perda dan Perkada, meskipun tetap menjaga mutu

pelayanan, dikarenakan proses akreditasi dan penyesuaian mekanisme standar operasional prosedur (SOP) belum sepenuhnya selesai sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung indikator.

- b. Tahun 2025 seiring dengan menurunnya tingkat partisipasi dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta meningkatnya dinamika sosial dan aktivitas usaha di beberapa wilayah rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, sehingga mempengaruhi capaian persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Solusi agar faktor penghambat tidak tercapaiannya indikator Program adalah:

- a. Diwajibkan membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjaga mutu pelayanan penanganan pelanggaran Perda dan Perkada, serta komitmen melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten guna menjamin kualitas dan kepastian pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan penguatan sarana dan prasarana pendukung operasional, termasuk pengadaan peralatan penunjang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sistem informasi pendukung kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

III.5 Akuntabilitas Keuangan

Untuk melengkapi pelaporan kinerja dan untuk keperluan efektivitas dan efisiensi dalam rangka pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, perlu disajikan pembiayaan dan realisasi dalam rangka mencapai kinerja tahun 2025.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.33
Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam Tahun 2025

No	Sasaran / IKU	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan	67.190.550.029	61.233.413.018	91.13
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada	3.013.673.100	2.544.262.588	84.42
	Total	70.204.223.129	63.777.675.606	90.85

Sumber : Laporan Hasil olahan Subkoor Program Data dan Informasi tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan untuk pencapaian Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kota Batam tahun 2025 adalah sebesar Rp 70.204.223.129 sedangkan penyerapannya adalah sebesar Rp. 63.777.675.606 atau sebesar 90.85%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024 maka pagu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mengalami peningkatan sebesar Rp 19.106.503.690 di Tahun 2025, demikian juga untuk realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp 13.426.563.726 (70.27%). Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar Grafik III.9
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Tahun 2024 dan 2025



Sumber : Laporan Hasil olahan Subkoor Program Data dan Informasi tahun 2025

III.5.1 Anggaran dan Realisasi keuangan terkait pencapaian kinerja

Sasaran Anggaran dan Realisasi Keuangan terkait pencapaian kinerja sasaran yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dan Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada tersebar dalam 2 program yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan mempunyai 9 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun 2025. Berikut sebaran pagu anggaran dan realisasi pada tabel dibawah ini :

Tabel III.34
Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pecapaian Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	67.190.550.029	61.233.413.018	91.13
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55.774.402.629	50.320.179.903	90.22
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55.710.302.629	50.256.419.903	90.21
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.100.000	63.760.000	99.47
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.291.032.000	1.246.176.700	96.53
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	667.110.000	639.432.500	95,85
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	623.922.000	606.744.200	97,25
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.171.000	185.511.220	79.56
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.710.000	5.381.000	94,24
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.650.000	48.931.600	83,43
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.760.000	58.760.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.059.000	32.059.000	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.392.000	36.779.620	49,44

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.397.776.000	1.179.625.000	84.39
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	682.686.000	552.500.000	80,93
	Pengadaan Mebel	516.655.000	480.525.000	93,01
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	198.435.000	146.600.000	73,88
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.218.134.400	8.043.252.585	97.87
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.740.000	198.766.255	96,61
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.012.394.400	7.844.486.330	97,90
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.034.000	258.667.610	93.71
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.380.000	38.432.554	92,88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.070.000	141.267.796	91,69
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.240.000	20.295.000	95,55
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.344.000	58.672.260	98,87
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.013.673.100	2.544.262.588	84.42
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.041.778.000	765.716.000	73.50
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.368.000	820.000	59,94
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.334.000	5.290.000	99,18
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	850.000	453.000	53,29
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	12.316.000	8.940.000	72,59
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan	32.590.000	14.175.000	43,49

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional			
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	15.580.000	14.660.000	94,09
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	59.640.000	43.320.000	72,64
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	864.100.000	678.058.000	78,47
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	50.000.000	-	0,00
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.909.611.100	1.722.059.728	90.18
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	524.718.000	400.547.728	76,34
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.774.000	1.304.000	97,62
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1.236.419.100	1.180.308.000	95,46
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	128.700.000	121.900.000	94,72
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	62.284.000	56.486.860	90.69
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	62.284.000	56.486.860	90,69
total		70.204.223.129	63.777.675.606	90.85

BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2025 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2025. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Capaian Kinerja tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam ini dapat menggambarkan kinerja Kami selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, maupun kinerja sasaran beserta analisi kinerja yang dilaporkan.

Pada tahun 2025, setelah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan berupa perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2025-2029 maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dan Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada dengan menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berikut 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang diukur di Tahunan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel IV.1
Capaian kinerja Indikator Sasaran Strategi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	87	91.18	104.80%
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	80.67	85.93	106.52%
		Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	22.89	22.02	96.20%

Sumber : Laporan Hasil olahan Subkoor Perencanaan Program tahun 2025

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja indikator tersebut di atas, secara umum diperoleh, 1 indikator (91.18%) melebihi target, 1 indikator (85,93%) melebihi target dan 1 indikator (22.02%) tidak mencapai target.

Adapun faktor pendorong tercapai dan terlampauinya pencapaian untuk 3.(tiga) indikator tersebut di atas adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja faktor yang mendorong tercapainya target adalah:
 - a. Pemenuhan sumber daya serta sarana dan prasarana yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam guna menunjang kelancaran dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Penambahan fasilitas pendukung pelayanan seperti ruang pelayanan yang lebih representatif, sistem antrean yang tertata, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan.
 - c. Peningkatan kompetensi aparatur dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui pendidikan dasar dan pelatihan teknis maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia.

- d. Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan melalui digitalisasi administrasi serta tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan layanan secara berkesinambungan sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja..
- e. Upaya Perbaikan lingkungan baik lingkungan fisik, sosial maupun biologis oleh Pemerintah Kota Batam, salah satu caranya adalah dengan terus meningkatkan akses pelayanan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
- f. Peningkatan upaya promotif untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman melalui berbagai media informasi dan komunikasi yang dimungkinkan.

Dari 3 (tiga) indikator IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam ada 1(satu) indikator yang tidak tercapai yaitu : Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM).

Adapun faktor-faktor penghambat tidak tercapainya target indikator Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM) di tahun 2025 adalah :

- a. Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang belum merata di setiap kelurahan, sehingga memengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen Satlinmas
- b. Pembinaan dan evaluasi telah dilakukan secara berkala oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, namun belum sepenuhnya diikuti dengan tindak lanjut perbaikan secara menyeluruh di seluruh wilayah.
- c. Adanya kendala teknis dalam pemanfaatan sistem pelaporan dan aplikasi pendukung administrasi, termasuk keterbatasan pemahaman aparatur dalam pengoperasian teknologi informasi.
- d. Standar penilaian indikator IPM yang semakin komprehensif dan berbasis dokumen administrasi menyebabkan perlunya penyesuaian tata kelola dan kelengkapan data dukung yang belum sepenuhnya terpenuhi.
- e. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan anggota Satlinmas yang belum optimal akibat keterbatasan anggaran serta penyesuaian jadwal kegiatan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Adapun solusi dan strategi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Batam untuk mencapai target IKS di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan intervensi lanjutan melalui pembinaan kepada aparaturnya pelaksana pelayanan dan petugas front office agar lebih responsif, ramah, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait peningkatan cakupan indikator yang masih rendah (antara lain: kecepatan waktu pelayanan, ketepatan penyelesaian administrasi, kualitas sarana dan prasarana pelayanan, serta efektivitas penanganan pengaduan masyarakat).
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam serta instansi pembina pelayanan publik guna memastikan kesesuaian standar pelayanan dan instrumen survei kepuasan masyarakat.
- d. Melaksanakan penguatan dan pembinaan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pelayanan prima (service excellent), peningkatan kompetensi teknis, serta internalisasi budaya kerja berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- e. Penetapan Surat Keputusan (SK) pengelola program dan tim survei kepuasan masyarakat secara formal guna memperjelas tugas, tanggung jawab, dan mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- f. Meningkatkan monitoring pelaksanaan program dan evaluasi hasil survei secara berkala, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan layanan untuk memastikan adanya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja kami pada periode Tahun 2024 selaku penerima amanah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Batam.

Batam, 20 Februari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam




Imam Tohari, S.H.M.H
Pembina Tk I
Nip. 19730510 200701 1 033

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BATAM**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Tohari, S.H.,M.H
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AMSAKAR ACHMAD**
Jabatan : Wali Kota Batam
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batam, 14 Maret 2025

Pihak Kedua,

AMSAKAR ACHMAD

Pihak Pertama

Imam Tohari, S.H., M.H
NIP. 19730510 200701 1 033